



UNIVERSITAS INDONESIA

JUDUL

**DAMPAK KEBIJAKAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
(Studi Kasus Wilayah Provinsi Banten)**

TESIS

**EDY SUMIRAT, S.H.
NPM. 0806448522**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

JUDUL

**DAMPAK KEBIJAKAN PERIKANAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN**
(Studi Kasus Wilayah Provinsi Banten)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains (M.Si) Pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional
Pascasarjana Universitas Indonesia

EDY SUMIRAT, S.H.
NPM. 0806448522

PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM KAJIAN STRATEGIK KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Edy Sumirat, S.H.

Npm : 0806448522

Tanda tangan :

Tanggal : 11 Juli 2011




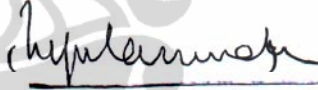
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Edy Sumirat, S.H
 Npm : 0806448522
 Program Studi : Pascasarjana Universitas Indonesia
 Judul Tesis : **DAMPAK KEBIJAKAN PERIKANAN TERHADAP
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN. (Studi
 Kasus wilayah Provinsi Banten.)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Pascasarjana Universitas Indonesia

Ketua dewan penguji : Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara ()

Anggota : Prof. Dr. Lepi T. Tarmidi. 

Dr. Amirsyah Sahil, SE., M.Si 

Ir. Rustam Seonang, M.Si. 

Sekretaris : Dr. Amirsyah Sahil, SE., M.Si 

Ditetapkan di : Jakarta
 Hari/tanggal : Senin, 11 Juli 2011
 Pukul : 13.00

KATA PENGANTAR

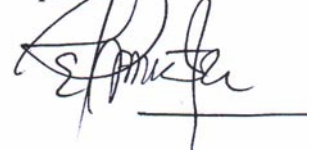
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Science pada Fakultas Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

- (1) Prof. Lefi Tarmidi selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Ir Rustam Seonang, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang dengan teliti memeriksa, mengarahkan dan memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Prof Dr. Rony Rahman Nitibaskara selaku Dewanj Penguji dalam pelaksanaan sidang tesis ini.
- (4) Dr.Amirsyah Sahil, S.E. M.Si. selaku Sekertaris Program PKN UI sekaligus Dewan Penguji dalam pelaksanaan tesis ini.
- (5) Seluruh Dosen PKN UI yang sejak kuliah awal telah memberikan gambaran tentang rencana penyusunan tesis sebagai tugas akhir yang ahrus dilaksanakan dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Indonesia;
- (6) Instansi Pemerintah daerah di wilayah kerja Propinsi Banten, dalam hal ini Pangkalan TNI AL Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Propinsi, Dirpolair wilayah Kabupeten Serang dan Pandegelang, Pengurus HNSI wilayah Serang dan Pandegelang, segenap tokoh masyarakat nelayan diwilayah Labuhan dan Karangantu yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (7) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 11 Juli 2011

penulis



ABSTRAK

Nama : Edy Sumirat, SH.
Program Study : Magister Science
Judul : Dampak kebijakan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di wilayah Provinsi Banten)

Tesis ini membahas ketahanan masyarakat pesisir di wilayah Propinsi Banten. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain diskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa ; pemerintah daerah harus segera mengeluarkan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah Propinsi Banten; pemerintah bersama unsur Muspida bersama-sama mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan; Dirjen perhubungan dan Dirjen Kelautan dan Perikanan segera melakukan pembenahan mengenai kewenangan dalam perizinan kapal ikan dan kapal niaga.

Kata kunci :

Ketahanan masyarakat, pemberdayaan dan kebijakan

ABSTRACT

Name : EdySumirat, SH.
Study programs : Master of Science
Title : Impact of Empowerment Against Fisheries policy Coastal
Communities (Case Study in the Province of Banten)

This thesis discusses the resilience of coastal communities in the Province of Banten. To know the implementation of the Regional Government policies in an effort to improve the welfare of fishing communities by optimizing the management of fisheries resources. This study is a qualitative research design with descriptive analytic. The results suggest that; local government should immediately issue a policy on the empowerment of coastal communities in the region, Banten Province; Muspida government together with the elements together to optimize the management of marine resources; Directorate General for Communication and Directorate General of Maritime Affairs and Fisheries immediate revamping of the licensing authority in fishing vessels and merchant ships.

Key words:
Community resilience, empowerment and policy

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas mahasiswa Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy Sumirat, S.H
Npm : 0806448522
Program studi : Kajian Statejik Ketahanan Nasional
Fakultas : Pascasarjana Universitas Indonesia
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Dampak Kebijakan Perikanan
Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
(Studi kasus di wilayah Privinsi Banten)**

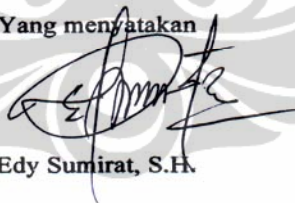
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusife ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan



Edy Sumirat, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Perumusan masalah.....	11
1.2. Tujuan Penelitian.....	11
1.3. Ruang lingkup penelitian dan pembatasannya.....	12
1.4. Pengambilan data.....	13
2. KETAHANAN WILAYAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELAUTAN.....	14
2.1. Kebijakan.....	14
2.2. Pemberdayaan.....	15
2.3. Teori Ketahanan Nasional.....	22
3. PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI PROVINSI BANTEN.....	27
3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Banten.....	27
3.2. Pembangunan Provinsi Banten.....	33
3.3. Optimalisasi.....	43
4. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	47
4.1. Permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Banten.....	47
4.1.1 Kondisi di Kabupaten Serang.....	47
4.1.2 Kondisi di Kabupaten Pandeglang.....	54
4.2. Analisa tentang dampak kebijakan pemerintah daerah.....	61

4.3. Analisa program pemerintah Provins Banten	64
4.3. Hasil temuan penelitian.....	66
5. PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan hasil penelitian	68
5.2. Saran yang diharapkan dapat bermanfaat	69

DAFTAR REFERENSI



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Kuisisioner Penelitian.
2. Lampiran Pedoman Wawancara



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sudah menjadi suatu mitos yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah, baik sumber hayatinya maupun non hayatinya, walaupun mitos seperti itu perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Terlepas dari mitos tersebut, kenyataannya Indonesia adalah negara maritim dengan 70% wilayahnya adalah laut, namun sangatlah ironis sejak 42 tahun yang lalu kebijakan pembangunan perikanan kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada pasal 5 dikatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam pelaksanaannya diatur dalam pasal 6 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah ; antar-Pemerintah Daerah; antar sektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Sehubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dikaitkan dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan desentralisasi, di mana Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk membangun dan mengatur segala urusan daerahnya dengan tidak terlepas dari pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atas segala pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah otonom mempunyai

kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan tetap pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir melalui pembangunan perikanan mendapat prioritas sehingga dapat menjaga kesinambungan sumberdaya perikanan dan prasarana di wilayah pesisir. serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

Sebagaimana kondisi masyarakat pesisir pada umumnya di wilayah Indonesia adalah :

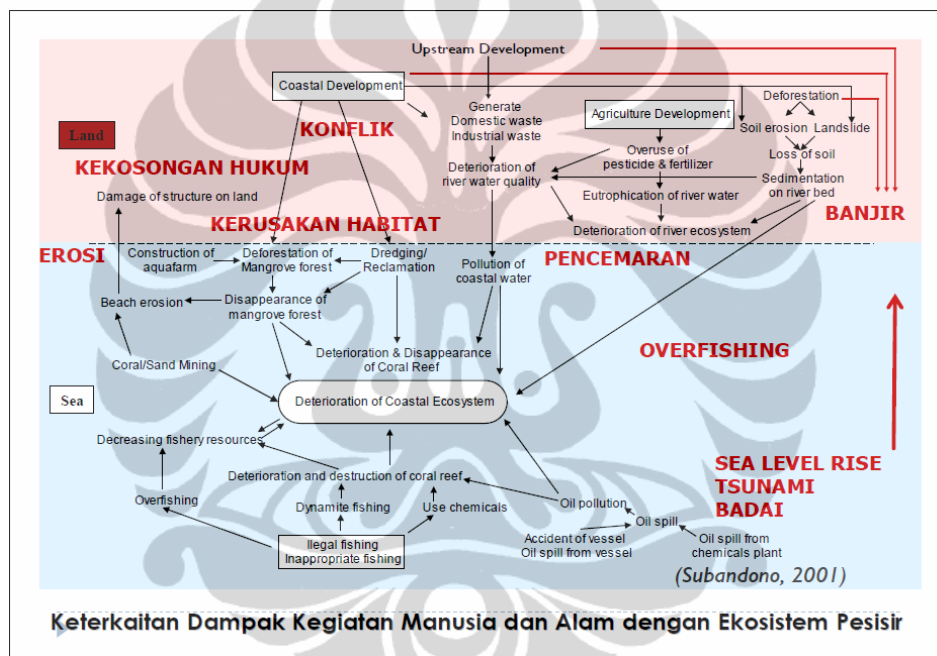
- a. Mayoritas nelayan merupakan nelayan tradisional yang belum kondusif untuk kemajuan
- b. Armada penangkapan dengan skala kecil dan IPTEK rendah.
- c. Tingkat pemanfaatan stok ikan antara daerah satu dengan daerah.lainnya masih timpang.
- d. Terjadi kerusakan ekosistem laut. Seperti : hutan bakau, trumbu karang, lamun, dll
- e. Banyak ilegal fishing.

Untuk saat ini laut tidak lagi merupakan sumberdaya yang kaya keanekaragaman, keunikan biota dan satu kesatuan ekosistem yang ada di dunia ini, tapi laut merupakan penampung segala sampah yang ada di muka bumi ini.

Sampah yang berasal dari daratan mulai dari limbah domestic, limbah indurti, serta limbah akibat transportasi jalur laut baik yang sengaja maupun tidak disengaja. kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah pantai. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi. Kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia seperti sedimentasi daerah pesisir (pantai), kerusakan dan konversi hutan mangrove khususnya akibat pengembangan lahan tambak dan praktek produksi yang tidak ramah lingkungan.

Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak, sebagaimana pada tahun 2003 beberapa kasus yang ditanggulangi seperti tumpahan minyak kapal tangki di Binuangeun dan di Cilegon. Sementara praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal (*illegal fishing*) serta penambangan terumbu karang masih diperkirakan masih terjadi yang memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut.

Ilustrasi dampak kegiatan buatan manusia atau alam diwilayah pesisir



Salah satu limbah yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan kehidupan biota laut adalah limbah panas yang berasal dari industry di daerah pesisir yang mengantarkan panas dari hasil produksi industry. Telah diketahui bahwa buangan limbah panas terbesar berasal dari pembangkit listrik. Apabila limbah ini menyebar keseluruhan perairan laut maka akan sangat membahayakan bagi lingkungan laut dan hajat hidup biota laut tentunya.

Semakin berkembangnya industry-industri yang ada diwilayah pesisir semakin besar peluang pencemaran laut. Industri mengeluarkan limbah yang mencemari lingkungan laut. Begitupun dengan populasi manusia mengeluarkan limbah, seperti limbah rumah tangga yang dapat mencemari

lingkungan, dengan besarnya peluang pencemaran baik dari industry maupun populasi manusia, maka dari limbah tersebut muncul bahan-bahan sintetik yang tidak alami (insektisida, obat-obatan, dan sebagainya) yang dapat meracuni lingkungan. Selanjutnya lingkungan semakin rusak dan mengalami pencemaran. Pencemaran laut yang ada akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.

Pembangunan dibidang kelautan merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk menunjang terwujudnya masyarakat yang adil makmur merata seimbang dan berkelanjutan. Kebijakan perikanan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia sangat penting terutama untuk mendukung ketahanan masyarakat pada satu wilayah.

Pengelolaan sumberdaya laut dalam tesis ini, peneliti lebih menitik beratkan pada pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dan kebijakan lain yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan.

Menyadari pentingnya sumberdaya perikanan dalam pelaksanaan pengembangannya perlu diusahakan melalui pendekatan yang terpadu lintas sektoral. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilakukan seoptimal mungkin, yaitu dengan mendorong masyarakat khususnya masyarakat pesisir untuk memanfaatkan semua jenis potensi kelautan, terutama perikanan diperlukan suatu regulasi yang dapat menjamin pengamanan sumberdaya kelautan oleh masyarakat itu sendiri bersama instansi terkait untuk meningkatkan ketahanan daerah guna kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana dalam pengelolaan sumberdaya perikanan begitu luasnya diwilayah Indonesia, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian pada wilayah Propinsi Banten. Dan sebagaimana telah dijabarkan dalam strategi dan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Banten pada bidang perikanan, hal tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk

menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya. Arah kebijakan tersebut adalah meliputi :

- a. Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan nelayan, dan pembudidaya ikan yang berorientasi pada penyuluh swakarsa.
- b. Perkuatan Kelembagaan Pertanian dan Perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif.
- c. Pembangunan delivery system dengan dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
- d. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pertanian dan nelayan.

Provinsi Banten memiliki potensi kelautan dan perikanan dengan potensi besar. Hal ini terlihat dari potensi perikanan pantai, maupun samudera yang dimilikinya. Provinsi Banten memiliki garis pantai sepanjang 517,42 km dengan luas wilayah perairan laut yang berhak dikelola sekitar \pm 11.500 dengan 61 buah pulau-pulau kecil didalamnya. Apabila dibandingkan luas laut yang dimiliki Provinsi Banten lebih luas dari daratannya. Seperti diketahui luas daratan Banten hanya sekitar 8.800,83 km² (*Sumber : Bapeda Provinsi Banten*), Dengan demikian sudah sepentasnya potensi kelautan dan perikanan Provinsi Banten memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banten.

Secara geografis Provinsi Banten memiliki tiga wilayah perairan yang mempunyai tiga karakter yang berbeda, yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah barat Selat Sunda, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Karakteristik sumberdaya ikan pada perairan utara Banten adalah umumnya kelompok ikan pelagis kecil dan perairan selatan mempunyai karakteristik sumberdaya ikan pelagis besar. Sedangkan di Selat Sunda merupakan kombinasi antara keduanya (memiliki karakteristik sumberdaya ikan pelagis besar dan kecil). Besarnya potensi kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten seperti telah dikemukakan di atas, merupakan sebuah tantangan besar bagi Pemerintah Propinsi Banten dalam hal ini instansi Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Banten untuk mengelolanya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Banten. Salah satu aspek yang mempunyai potensi di Provinsi Banten adalah perikanan dan kelautan yang terdiri dari perikanan darat yaitu budidaya dan perikanan laut yang meliputi penangkapan dan juga budidaya.

Produksi ikan di Banten pada tahun 2009 tercatat sebesar 89,05 ribu ton. Dimana, sekitar 62,74 persennya atau 55,87 ribu ton berasal dari hasil penangkapan, terutama hasil tangkapan ikan laut yang mencapai 55,14 ribu ton. Sisanya, yaitu sekitar 37,26 persen atau 33,18 ribu ton berasal dari budidaya perikanan, dimana budidaya tambak ikan penyumbang terbesar dengan perolehan sebanyak 14,94 ribu ton. (lihat gambar, 6.6.2)

Tabel 6.6.2 **Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (ton), 2009**
Table 6.6.2 Production of Fish Capture by Regency/Municipality in Banten Province (tons), 2009

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laut <i>Marine Fisheries</i>	Perairan Umum <i>Inland Water</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten / Regency			
1. Pandeglang	25 724,70	-	25 724,70
2. Lebak	2 882,73	107,32	2 990,05
3. Tangerang	18 120,00	116,00	18 236,00
4. Serang	7 889,70	497,80	8 387,50
Kota / Municipality			
5. Tangerang	-	-	0,00
6. Cilegon	224,00	-	224,00
7. Serang	302,78	4,20	306,98
8. Tangerang Selatan	-	-	-
Provinsi Banten	55 143,91	725,32	55 869,23
2008	56 725,30	638,48	57 363,78

Sumber / Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Office of Marine and Fishery Service of Banten Province

Tabel 6.6.8 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (ribu rupiah), 2009
Table **6.6.8** *Production Value of Fish Culture Households by Regency/Municipality in Banten Province (thousand rupiahs), 2009*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Budidaya Laut Marine Culture	Tambak Brackish Water Pond	Kolam Fresh Water Pond	Sawah Paddy Field
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten / Regency				
1. Pandeglang	-	9 356 487	21 122 632	19 297 779
2. Lebak	-	74 050	37 191 041	573 343
3. Tangerang	4 010 066	37 670 860	17 028 223	54 255
4. Serang	1 796 995	43 422 795	4 583 505	4 489 699
Kota / Municipality				
5. Tangerang	-	-	5 642 780	-
6. Cilegon	-	-	1 150 533	-
7. Serang	-	8 109 000	1 240 260	-
8. Tangerang Selatan	-	-	-	-
Provinsi Banten	5 807 061	98 633 192	87 958 974	24 415 076
2008	11 314 855	112 378 958	77 728 325	58 722 110

Lanjutan Tabel / Continued Table 6.6.8

<i>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</i>	<i>Karamba Cage</i>	<i>Jaring Terapung Floating Cage Net</i>	<i>Jumlah Total</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten / Regency			
1. Pandeglang	-	164 585	49 941 483
2. Lebak	268 696	3 306 290	41 413 420
3. Tangerang	-	2 886 584	61 649 988
4. Serang	-	-	54 292 994
Kota / Municipality			
5. Tangerang	-	496 852	6 139 632
6. Cilegon	-	-	1 150 533
7. Serang	-	-	9 349 260
8. Tangerang Selatan	-	-	-
Provinsi Banten	268 696	6 854 311	223 937 310
2008	747 505	7 779 800	268 671 553

Sumber / Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Office of Marine and Fishery Service of Banten Province

Adapun jumlah masyarakat nelayan di Provinsi Banten yang tergolong nelayan tangkap dan nelayan budidaya adalah sejumlah 60.970 orang yang terdiri dari nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Dapat terlihat pada table 2.5 dan 3.3 dibawah ini :

Tabel 2.5 Jumlah nelayan menurut kategori nelayan, 2004-2009

Rincian		Tahun						Kenaikan Rata-Rata	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2004 - 2009	2008 - 2009
Jumlah	Jumlah - Total	25.912	30.281	28.872	28.128	24.250	25.790	0%	6%
	Perikanan laut	24.304	25.043	25.380	26.183	22.305	23.678	0%	6%
	Perikanan umum	1.608	5.238	3.492	1.945	1.945	2.112	31%	9%
Nelayan penuh	Jumlah - Total	21.255	19.241	20.582	21.234	14.974	11.422	-11%	-24%
	Perikanan laut	20.936	19.241	20.582	21.234	14.974	10.936	-11%	-27%
	Perikanan umum	319	-	-	-	-	486	0%	0%
Sambilan utama	Jumlah - Total	3.460	8.959	5.673	4.904	7.456	9.069	36%	22%
	Perikanan laut	2.633	5.317	3.498	3.657	6.209	7.818	34%	0%
	Perikanan umum	827	3.642	2.175	1.247	1.247	1.251	52%	0%
Sambilan tambahan	Jumlah - Total	1.197	2.081	2.617	1.990	1.820	5.299	52%	191%
	Perikanan laut	735	485	1.300	1.292	1.122	4.924	92%	339%
	Perikanan umum	462	1.596	1.317	698	698	375	27%	-46%

Tabel 3.3 Jumlah petani ikan budidaya menurut jenis budidaya dan Kabupaten/Kota Pada Tahun 2009 di Provinsi Banten

Satuaan: orang

KABUPATEN/KOTA	Jumlah	Jenis Budidaya					
		Budidaya laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring apung	Sawah
JUMLAH - TOTAL	35,183	741	3,458	19,339	513	144	10,988
Kab.Serang	1,800	167	1,062	386	-	-	185
Kab.Pandeglang	7,700	-	28	6,360	98	4	1,210
Kab.Lebak	18,694	-	203	8,542	415	15	9,519
Kab.Tangerang	5,458	574	1,280	3,420	-	110	74
Kota Tangerang	18	-	-	3	-	15	-
Kota Cilegon	353	-	-	353	-	-	-
Kota Serang	1,160	-	885	275	-	-	-

Adapun armada penangkapan ikan laut pada tahun 2009 berjumlah 5.830 buah yang terdiri dari 4.198 motor tempel, 1.170 kapal motor dan perahu layar berbagai ukuran sebanyak 95 buah. Sementara luas areal budidaya ikan pada tahun 2009 mencapai 11,86 hektar, dimana budidaya terbesar dilakukan di sawah dengan luas 5,57 hektar dan terkecil pada jarring terapung seluas 0,72 hektar. (lihat gambar, 6.6.4)

Tabel 6.6.4 Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Perahu/Kapal di Provinsi Banten, 2009
Number of Fishing Boats by Regency/Municipality and Type of Boat in Banten Province, 2009

Kabupaten/Kota <i>Reg./Municipality</i>	Jukung <i>Unmotor- ized Boat</i>	Perahu Layar Kecil <i>Small Sailing Boat</i>	Perahu Layar Sedang <i>Medium Sailing Boat</i>	Perahu Layar Besar <i>Large Sailing Boat</i>	Motor Tempel <i>Out-board Motor</i>	Kapal Motor <i>In-board Motor</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten / Reg.							
1. Pandeglang	80	71	-	-	120	543	814
2. Lebak	-	-	24	-	518	179	721
3. Tangerang	-	-	-	-	2 449	132	2 581
4. Serang	63	-	-	-	638	95	796
Kota / Mun.							
5. Tangerang	-	-	-	-	-	-	-
6. Cilegon	224	-	-	-	272	157	653
7. Serang	-	-	-	-	201	64	265
8. Tangerang Sel.	-	-	-	-	-	-	-
Provinsi Banten	367	71	24	-	4 198	1 170	5 830
2008	554	77	-	-	4 531	1 398	6 560

Sumber / Source : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
Office of Marine and Fishery Service of Banten Province

Mengingat Propinsi Banten memiliki beberapa wilayah pesisir yang sangat produktif, maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengambilan data dan informasi sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan pada dua Kabupaten yang berada di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

2. Perumusan masalah

Atas dasar fakta tersebut, melalui penelitian, ingin dijawab sejumlah pertanyaan terhadap topik penelitian ini, yaitu :

- a) Bagaimana dampak kebijakan pemerintahan daerah dalam upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perhubungan Laut (dalam hal ini syahbandar) pada tingkat kabupaten dan TNI Polri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.?
- b). Bagaimana program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam upaya peningkatan ketahanan daerah Provinsi Banten ?.

3. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah secara umum ingin mengetahui bagaimana keuletan dan ketangguhan masyarakat pesisir di wilayah Banten dikaitkan dengan Ketahanan Nasional, dan tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a). Mengidentifikasi secara komparatif program apa saja yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah beserta TNI dan Polri dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat nelayan di Provinsi Banten.

b). Mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam aspek pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah daerah provinsi Banten melalui pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya perikanan di wilayahnya.

4. Ruang Lingkup Penelitian dan Pembatasannya.

Mengingat sifat dari penelitian ini adalah multidisiplin, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir Banten melalui pemberdayaan masyarakat nelayan yang berada di Provinsi Banten.

Nelayan sebagai objek dalam pemberdayaan sumberdaya perikanan tetapi pada kenyataannya nelayan masih merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Inipun merupakan kecenderungan diberbagai Negara, Sementara di Indonesia nelayan masih belum berdaya secara ekonomi dan politik. Sebagaimana kehidupan masyarakat nelayan di Provinsi Banten yang cenderung tidak menguntungkan dalam aspek kehidupan para nelayan, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di propinsi Banten.

Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitiannya pada dua Kabupaten yang ada di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang untuk memperoleh informasi yang sebenarnya tentang bagaimana pengelolaan sumberdaya perikanan yang dilakukan pemerintah setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

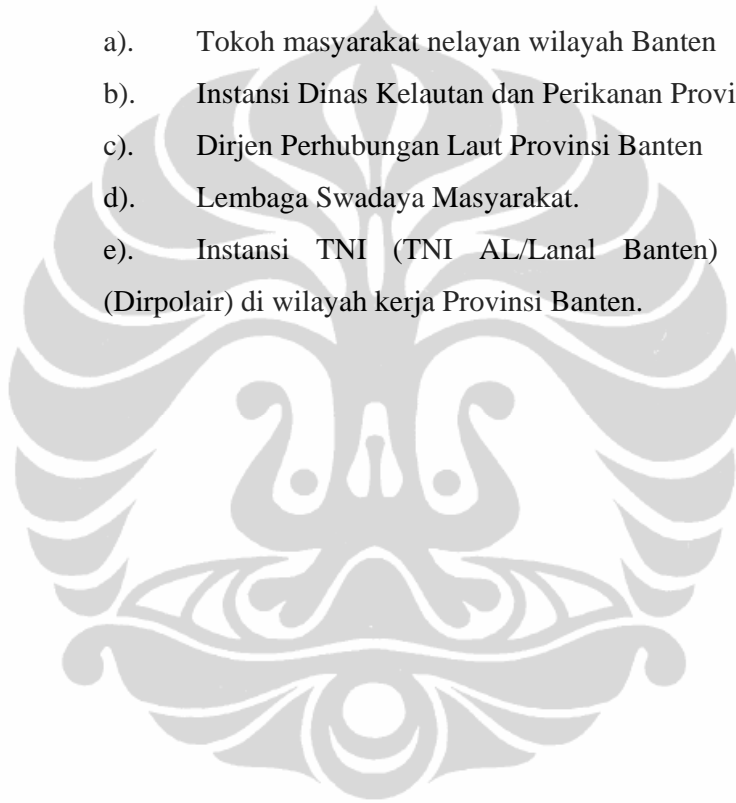
Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, serta terdiri dari data primer berupa wawancara dan kuisioner kepada beberapa responden dan data sekunder dari data statistik Provinsi Banten.

5. Pengambilan data.

Dalam melakukan pengambilan data dilakukan wawancara dengan responden dan pengamatan di lapangan terhadap hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

Responden penelitian dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah :

- a). Tokoh masyarakat nelayan wilayah Banten
- b). Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
- c). Dirjen Perhubungan Laut Provinsi Banten
- d). Lembaga Swadaya Masyarakat.
- e). Instansi TNI (TNI AL/Lanal Banten) dan Polri (Dirpolair) di wilayah kerja Provinsi Banten.



BAB 2

TEORI DAN KEBIJAKAN

Ketahanan Wilayah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pembahasan dalam kajian ini, pemeliti melandasi pada tiga teori dan beberapa pendapat dan konsep dari para pakar. Ketiga teori tersebut adalah teori tentang kebijakan, konsep tentang pemberdayaan dalam aspek masyarakat pesisir dan teori ketahanan nasional dalam aspek ketahanan wilayah.

2.1 Kebijakan

Bauer (1968), dalam tulisannya yang paling awal mengacu kepada kebijakan sebagai satu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan datang atau yang diharapkan. Ia membedakan tiga tingkat keputusan yang berlainan yang di dasarkan pada luasnya implikasi yang timbul pada tingkat keputusan tersebut. Pertama, adalah keputusan yang sepele dan bersifat berulang menangani tindakan-tindakan rutin yang dibuat hampir setiap hari. Kedua adalah keputusan yang lebih kompleks, memiliki jangkauan yang lebih luas dan membutuhkan tingkat nalar atau analisis tertentu. Keputusan di tingkat ini disebut 'taktik'. Ketiga, adalah keputusan-keputusan yang memiliki jangkauan yang paling luas, perspektif waktu yang paling lama, dan umumnya memerlukan informasi dan kontemplasi yang terbanayak. "keputusan pada tingkat ini disebut 'kebijakaan' (Bauer, 1968, h.2)¹

Sementara penjelasan tambahan dikemukakan oleh Lowi (1972,h,27), yang mendefinisikan sebagai *pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga negara dengan menggunakan sangsi-sangsi yang positif dan negatif.*²

¹ Mayer, Robert R, Dan Ernest Greenwood "Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial", Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta, 1984, h.2

² Ibid, h 4

Kebijakan menurut kamus Oxford³ dapat diartikan sebagai berikut ; 1. *Rencana aksi, pernyataan tentang tujuan-tujuan dan ide-ide terutama yang dibuat oleh pemerintah, partai politik, perusahaan bisnis, petugas yang berhubungan dengan pemerintah; 2. Bijak, tingkah laku yang bijaksana, bagian dari pemerintah.* Sedangkan menurut kamus Webster dapat diartikan sebagai berikut ; Didefinisikan sebagai bagian metoda aksi yang dipilih diantara alternatif yang diberikan oleh kondisi untuk menunjukkan dan menjelaskan kondisi saat ini dan masa depan.⁴

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat didefinisikan bahwa kebijakan sebagai suatu keputusan yang dipilih untuk bertindak yang berisikan pernyataan tujuan atau ide yang dibuat oleh pemerintah atau suatu kelompok sosial, yang digunakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terkait, dengan menggunakan sangsi-sangsi atau dengan kata lain, kebijakan itu sendiri, merupakan keputusan pernyataan (statement), yang diambil oleh para kalangan eksekutif, yang bertujuan sebagai petunjuk dan pengontrol bagi para perencana dalam merencanakan (planning), untuk menjaga keadilan (equity) dan keefektivan (effectiveness), dalam pembangunan.

2.2. Pembedayaan

Konsep pemberdayaan pada dasarnya lebih luas dari hanya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety needs*), namun substansi pemberdayaan adalah mendorong masyarakat dalam membangun potensi yang dimiliki agar dapat berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat

³ Hornby, AS, 'Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English,' tahun 1987/1990

⁴ Neufeld, Victoria, ' Webster New World Dictionary of American English,' Third College Edition,

melainkan juga pranata-pranatanya. Sehubungan dengan pembahasan konsep pemberdayaan dalam kajian ini, maka akan diutamakan dua konsep pemberdayaan yakni pemberdayaan secara Top down dan Bottem up.

Pemberdayaan (empowering) merupakan upaya peningkatan kekuatan atau posisi tawar masyarakat agar mereka bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, serta ikut menentukan dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pihak lain dan berpengaruh terhadap dirinya (misalnya program pembangunan dan perumusan kebijakan desa). Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang terkait dengan kekuasaan (power), dan konsep kekuasaan ini terkait dengan konsep lainnya yaitu: demokrasi.

Dalam konsepsi pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari pengertian tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir masyarakat. Sebagaimana pemberdayaan dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk mengelola kegiatan dalam bidang sumberdaya perikanan.

Menurut Nasikun (2000:27), aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM,

swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan⁵. Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya, sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat.

Menurut Dr. Ir. Victor P.H. Nikijulw, selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Kelautan dan Perikanan. Bahwa apa yang telah dimiliki oleh masyarakat adalah sumberdaya pembangunan yang perlu dikembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat sendiri.

Menurut Rikrik Hermawan, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha Propinsi Banten, pemberdayaan merupakan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya yang ada dalam suatu kelompok yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan didalam kelompok itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya mencakup Pemberdayaan pemerintahan desa yang terdapat 3 aspek yaitu antara lain ; *Aspek ekonomi*; melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui Badan Pemberdayaan Daerah telah dilaksanakan adanya program usaha Kecil Mandiri (UKM) pada setiap daerah. *Aspek kelembagaan* ; yang tersusun dari kelembagaan dalam kelompok masyarakat seperti RT/RW PKK, LPM, dan karang taruna. Partisipasi pemerintah desa melalui peranserta perangkat desa dalam

⁵[http://Admin in PembangunanPemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan](#), 10. Januari, 2009

upaya pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah pemerinthan desa tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dikategorikan mempunyai kecenderungan primer dan sekunder yaitu dilaksanakan melalui proses pengalihan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui regulasi khususnya regulasi dalam bidang pengelolaan sumber daya perikanan, dengan meletakkan dan mengorientasikan pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau petani/nelayan di pedesaan sebagai pusat pembangunan yang selanjutnya pemerintah memberikan motifasi dan sosialisasi atas kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, menurut Efrizal Syarief (Sekretariat KPEL) dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya penciptaan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, sehingga tercipta *kemandirian usaha permanen* dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Dr. Ir. Victor P.H. Nikijuluw, masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Kelompok kehidupan masyarakat pesisir diantaranya:

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan

ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

c) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Sedangkan factor kekuatan pemberdayaan masyarakat pesisir berada pada banyaknya masyarakat pesisir yaitu nelayan, pembudidaya, pengelola dan pedagang ikan yang perlu diberdayakan baik dari aspek ekonomi social dan politik. Sementara peluang adalah factor yang paling rendah dalam pemberdayaan ini. Meskipun demikian perhatian pemerintah yang cukup tinggi terhadap masyarakat pesisir merupakan peluang yang paling utama, sehingga dengan demikian pemberdayaan masyarakat pesisir masih tergantung pada dukungan pemerintah⁶.

Nelayan merupakan kelompok social yang selama ini terpinggirkan, baik secara social, ekonomi, maupun politik. Inipun merupakan kecenderungan diberbagai Negara. Di india identik dengan kasta rendahan. Di Kanada nelayan *firs Nation* juga marjinal secara ekonomi dan politik. Sementara di jepang propesi nekayan identic dengan *kitani*, *kitsui*, *kiken* yang artinya kotor, keras dan membahayakan. Akan tetapi nelayan dijepang meskipun secara social

⁶ Direktorat Kelautan dan Perikanan, *Kajian Kebijakan Kelautan alam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bapenas

rendahan, tidak secara ekonomi dan politik, mereka tetap diperhitungkan secara politik sehingga kebijakan pembangunan banyak yang pro kepada nelayan. Sementara di Indonesia nelayan masih belum berdaya secara ekonomi dan politik.⁷

Menurut Efrizal Syarief (Sekretariat KPEL) ; lemahnya perekonomian ekonomi masyarakat nelayan tradisional, disebabkan oleh adanya kesenjangan penggunaan teknologi antara pengusaha besar dan nelayan tradisional. Akibat dari kesenjangan tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional mengubah profesinya menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar. Sehingga menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan kecil/tradisional terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan dan pedagang, antara *periphery* terdapat center, antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan penguatan terhadap adanya komunitas juragan dan buruh nelayan

Aliran modernisasi menganggap bahwa persoalan kemiskinan nelayan disebabkan oleh factor internal masyarakat. Dalam aliran ini kemiskinan nelayan terjadi sebagai akibat dari faktor budaya (Kemalasan), keterbatasan modal dan teknologi serta keterbatasan management. Oleh karena itu sudah sepantasnya nelayan merubah budayanya dengan memperbaiki sistem usahanya dengan melakukan penciptaan usaha /kemandirian produksi dalam bidang perikanan⁸.

Panayotou (1982) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Pendapat Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai

⁷ Arif Satria, *ekologi politik nekayat*, Penerbit Ggramedia hal, 120

⁸ Arif Satria, *ekologi politik nekayat*, Penerbit Ggramedia. hal 91,

masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 pada Ketentuan Umum pasal 1 butir 2 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir pulau kecil dan besar, adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.
- c. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
- d. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (*resource-based*), memiliki pasar yang jelas (*market-based*), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (*environmental-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat local (*local society-based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*).

e. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atas dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

f. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir kegiatan utamanya adalah penyaluran dana secara bergulir kepada pemerintah daerah (Gubernur/Bupati), yang kemudian menyalurkannya kepada kelompok sasaran melalui lembaga keuangan (Bank). Selanjutnya selain itu juga dilakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada kelompok sasaran melalui penyediaan bantuan teknis/tenaga teknis. Dalam pelaksanaannya Bank berfungsi sebagai tempat mendistribusikan dana, fungsi Bank dalam hal ini dibagi dalam dua tahap yaitu :

- a. Bank berfungsi sebagai cenneling agent,
- b. Bank berfungsi sebagai executing agent.

2.3. Teori Ketahanan Nasional.

Menurut (R.M.Sunardi,2004:66) dalam buku Kewiraan yang diterbitkan oleh Lemhanas, keuletan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara(Lemhanas,1997:45) melalui delapan gatra yaitu, Tri Gatra (Kondisi Geografi, Kondisi Demografi, Kondisi Kekayaan Alam) dan Panca Gatra (Kondisi Pemahaman dan Pengamalan Ideologi, Kondisi Sistem Politik, Kondisi Sistem Ekonomi, Kondisi Sistem Sosial Budaya, Kondisi Hankam),

Konsep ketahanan wilayah menurut Wan Usman (2003 : 4-5)
adalah :⁹

- a. Kekuatan apa “yang ada” pada suatu bangsa dan Negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- b. Kekuatan apa “yang harus dimiliki” oleh suatu bangsa dan Negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
- c. Ketahanan (kemampuan) suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*regular*) dan stabilitas, yang didalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*).

Berdasarkan rumusan konseptual tersebut, Ketahanan Nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, ditengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. Dari definisi ini tersirat didalamnya bahwa Ketahanan Nasional itu dapat berupa kondisi dinamis suatu bangsa, serta dapat pula merupakan metode untuk mencapai tujuan (*means and ends*) agar bangsa tetap jaya. Adapun aspek kehidupan yang dimaksud pada konsepsi Ketahanan Nasional terangkum dalam Astagatra yang terdiri dari Trigatra (3 aspek alamiah : geografi, sumber daya alam dan kependudukan) dan Pancagatra (5 aspek sosial : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan).

Indra J. Piliang (dalam Bantarto Bandoro, editor : “Perspektif Baru Keamanan Nasional”), mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Wilayah perlu pengembangan kemampuan daerah baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Hal ini juga

⁹ Wan Usman, dkk. *Daya Tahan Bangsa* (Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia). Jakarta. 2003. Hlm.4 – 5.

berdampak pada pembinaan Ketahanan Nasional, karena Ketahanan Wilayah akan mempengaruhi Ketahanan Nasional.¹⁰

Soemarno Sodarsono dalam Edison (2006 : 83) mengemukakan bahwa Ketahanan Nasional yang merupakan suatu kondisi dinamik akan menjadi suatu kekuatan nyata dan efektif jika dibina secara bertahap melalui adanya Ketahanan Daerah / Wilayah, dimana Ketahanan Wilayah dibina melalui Ketahanan Lingkungan, selanjutnya Ketahanan Lingkungan dibina melalui Ketahanan Keluarga / Rumah Tangga dan pada akhirnya Ketahanan Keluarga akan bertumpu pada kekuatan-kekuatan unsurnya yaitu manusia yang memiliki Ketahanan Pribadi.

R.M. Sunardi dalam Edison (2006 : 83) berpendapat bahwa pembinaan Ketahanan Wilayah/Daerah mencakup beberapa kegiatan pokok, yaitu :

- a. Mempertahankan dan memantapkan kondisi keuletan dan ketangguhan yang tercapai. Hal ini merupakan sesuatu yang dinamis, karena mencakup proses meningkatkan kualitas menuju ke arah yang lebih mantap atau seimbang, secara integral
- b. Meningkatkan kondisi yang belum baik atau belum mantap.
- c. Penggalangan ATHG yang mempengaruhi kondisi keuletan dan ketangguhan daerah tersebut.

Pembinaan Ketahanan Wilayah dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kondisi kesejahteraan dan keamanan yang telah dicapai, dengan menggunakan indikator tingkat pertumbuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan stabilitas

¹⁰ Edison R. *Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Daerah*. PKN UI. 2006. Hlm.82.

Ketahanan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan rencana kedepan untuk mengembangkan kemampuan maksimal.

Untuk mengetahui tingkat Ketahanan Wilayah pada suatu waktu tertentu, sehingga pembinaannya bisa sesuai dengan kemampuan yang ada, maka diperlukan suatu metode tolak ukur ketahanan daerah, dengan landasan pemikiran antara lain ¹¹ :

- a. Bahwa pembinaan ketahanan daerah mencakup unsur-unsur yang bersifat fisik dan abstrak.
- b. Untuk mengukur kondisi ketahanan daerah perlu adanya penjabaran aspek kehidupan yaitu Astragatra menjadi unsur yang dominan dan parameter.
- c. Penjabaran Astragatra menjadi unsur dominan kemudian menjadi parameter dan sub-parameter berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan, maka tingkat ketahanan wilayah dapat diketahui melalui beberapa indikator sebagai tolak ukurnya sebagai berikut :

- a. Unsur pembinaan ketahanan wilayah yang dilaksanakan berupa pembangunan fasilitas fisik yaitu pembenahan infrastruktur pada wilayah laut dan akses menuju laut sebagai wilayah operasi mencari ikan bagi para nelayan
- b. Dimensi kesejahteraan dapat digunakan untuk mengukur ketahanan wilayah dengan menguraikan penjabaran aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek sosial, ekonomi dan lain-lain.

¹¹ Edison. *Ibid.* Hlm.84.

Dalam kebijakan strategi dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dalam kebijakan nasional dikatakan dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir meliputi :

a. Refitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat Revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut/pesisir, daalm rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Salah satu factor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir adalah hilangnya fungsi lindung kawasan-kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan lindung di wilayah daratan yang mengakibatkan pendangkalan perairan pesisir, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu karang (coral bleaching).

b. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu kunci dalam mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali.

c. Peningkatan pelayanan jaingan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Ketersediaan jaringan prasarana wilayah yang memadai akan menunjang pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal serta menunjang fungsi pesisir sebagai simpul koleksi-distribusi produk kegiatan ekonomi masyarakat.

BAB 3

PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI

PROVINSI BANTEN

Wilayah Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Panjang pesisir pada garis pantai wilayah Banten mencapai 1.876 km. Selat Sunda merupakan salah satu jalur yang dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia, Selandia Baru, dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia dan Singapura. Disamping itu Banten merupakan jalur perlintasan/penghubung dua pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera.

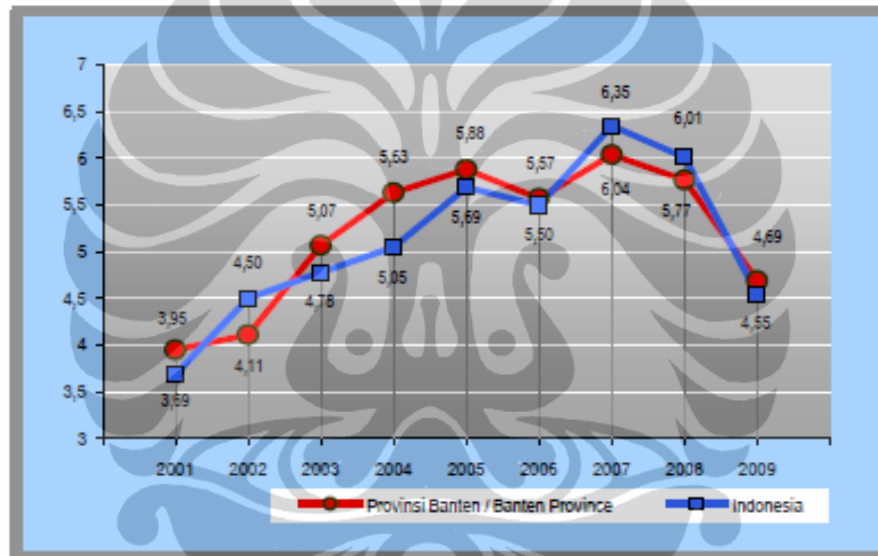
3.1. Perkembangan Ekonomi Propinsi Banten.

Sehubungan dengan otonomi daerah yang berlaku di Propinsi Banten, di dalam menyelenggarakan atau mengatur rumah tangga pemerintahan Banten sendiri dalam pengelolaan semua potensi daerah didasari dengan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dimana sebelumnya alokasi hasil daerah 75% untuk pusat dan 25% untuk dikembalikan kedaerah hal ini membuat daerah Banten sulit untuk mengembangkan potensi daerahnya baik secara ekonomi maupun budaya dan pariwisata.

Pasca otonomi daerah tingkat pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah sebesar 80% kembali ke daerah yang digunakan sebagai kas daerah Banten, pembangunan dan lain sebagainya dan 20% di salurkan ke pemerintahan pusat. Secara riil, ekonomi Banten pada tahun 2009 tumbuh sebesar 4,69 persen, melambat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang tumbuh sebesar 5,77 persen. Perlambatan tersebut dari sisi *supply* disebabkan oleh adanya perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada kebanyakan sector ekonominya terutama sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang masingmasing tumbuh sebesar

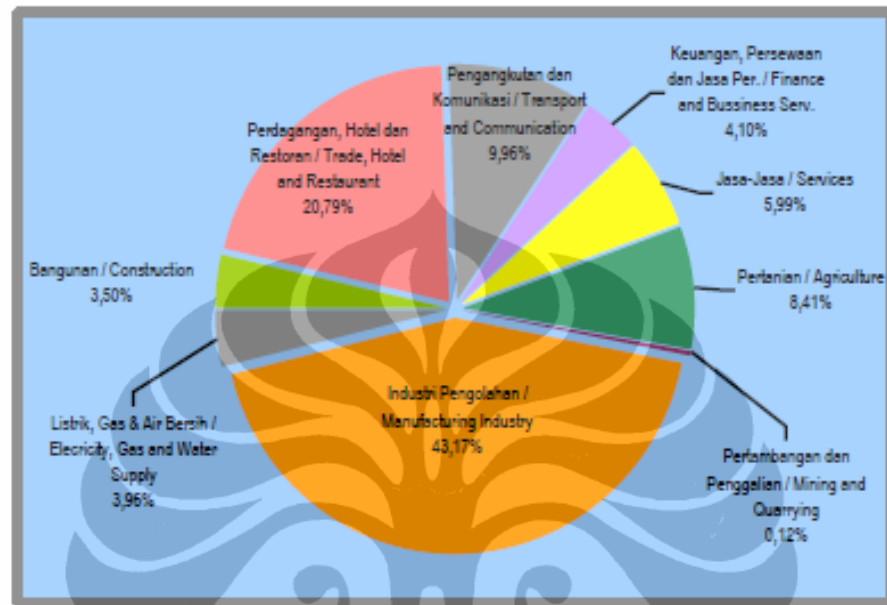
1,50 persen dan 6,51 persen, sebagai akibat adanya pelemahan pada sisi *foreign demand* dan melemahnya permintaan untuk investasi. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian Banten dengan *share* masing-masing sebesar 43,17 persen dan 20,79 persen. (lihat grafik 13.1, 13.2)

Grafik 13.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dan Nasional (persen), 2001-2009
Figure Indonesia and Banten Province Economic Growth Rate (percent), 2001-2009



Sumber / Source : BPS Provinsi Banten / BPS Statistics of Banten Province

Grafik 13.2 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2009
Percentage Distribution of GRDP of Banten Province At Current Market Prices by Industrial Origin, 2009

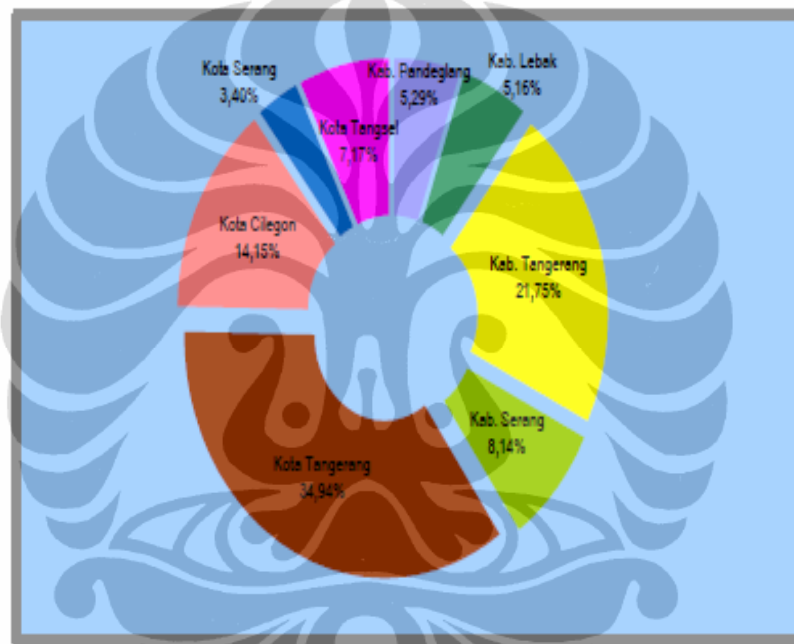


Sumber / Source : BPS Provinsi Banten / BPS Statistics of Banten Province

Sektor industri pengolahan terkonsentrasi di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagian besar terkonsentrasi pada tiga kabupaten/kota tersebut. Sehingga, pembentukan PDRB Banten pun secara spasial didominasi oleh ketiga kabupaten/kota tersebut. Tercatat, ketiga kabupaten/kota tersebut pada tahun 2009 masing-masing memberikan *share* sebesar 34,94 persen; 21,75 persen dan 14,15 persen terhadap pembentukan PDRB Nonimal Banten. Sedangkan sisanya yang hanya sebesar 29,16 persen disumbang oleh Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang. Sementara itu dari sisi pertumbuhan, Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 ini menjadi daerah yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya yaitu mencapai 8,49 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Serang yang hanya tumbuh sebesar 3,18 persen. Sedangkan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon masing-masing tumbuh sebesar 5,74 persen; 4,40 persen dan 4,84 persen. Meskipun demikian, andil

terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Banten tetaplah dipegang oleh Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan kontribusi masing-masing sebesar 1,19 *bps* (*basis points*); 0,98 *bps* dan 0,71 *bps*. (lihat garafik, 13.4)

Grafik 13.4 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Banten
Figure Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, 2009
*Percentage Distribution of GRDP of Banten Province
 At Current Market Prices by Regency/Municipality, 2009*



Sumber / Source : BPS Provinsi Banten / BPS Statistics of Banten Province

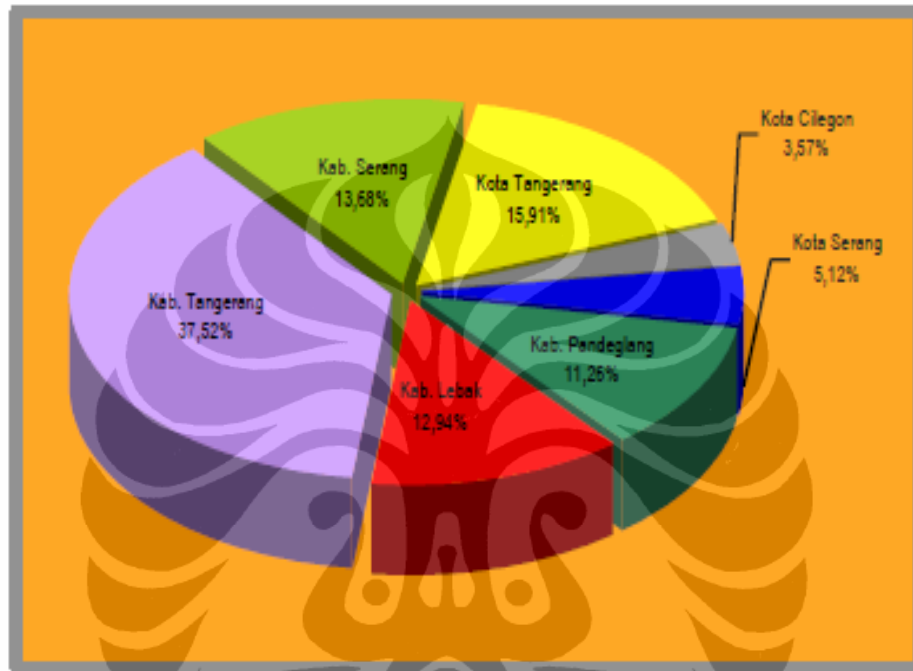
Jumlah penduduk Provinsi Banten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, penduduk Banten berjumlah 8,10 juta jiwa tapi pada tahun 2009 meningkat menjadi 9,78 juta jiwa, atau tumbuh rata-rata sebesar 2,12 persen per tahun. Apabila dibandingkan dengan proyeksi penduduk Indonesia yang mencapai 231,37 juta orang maka penduduk Banten pada tahun 2009 sudah mencapai 4,20 persen dari total penduduk Indonesia, sehingga Banten menjadi provinsi dengan populasi terbesar kelima di Indonesia. Pada tahun 2009, Banten juga termasuk empat besar provinsi yang terpadat penduduknya yaitu dengan tingkat kepadatan mencapai 1.085 jiwa per

km² atau untuk setiap satu kilometer persegi wilayah Provinsi Banten dihuni oleh sekitar 1.085 penduduk.

Persebaran penduduk di Banten secara spasial tidak merata, karena masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah kurang dari 14 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten, ketiga wilayah tersebut pada tahun 2009 dihuni oleh sekitar 53,47 persen dari seluruh penduduk Banten. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi sangat tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 10.101 jiwa per km². Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 367 jiwa per km². Berarti, Kota Tangerang hampir 28 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. (Lihat Grafik 4.1 dan Grafik 4.2)

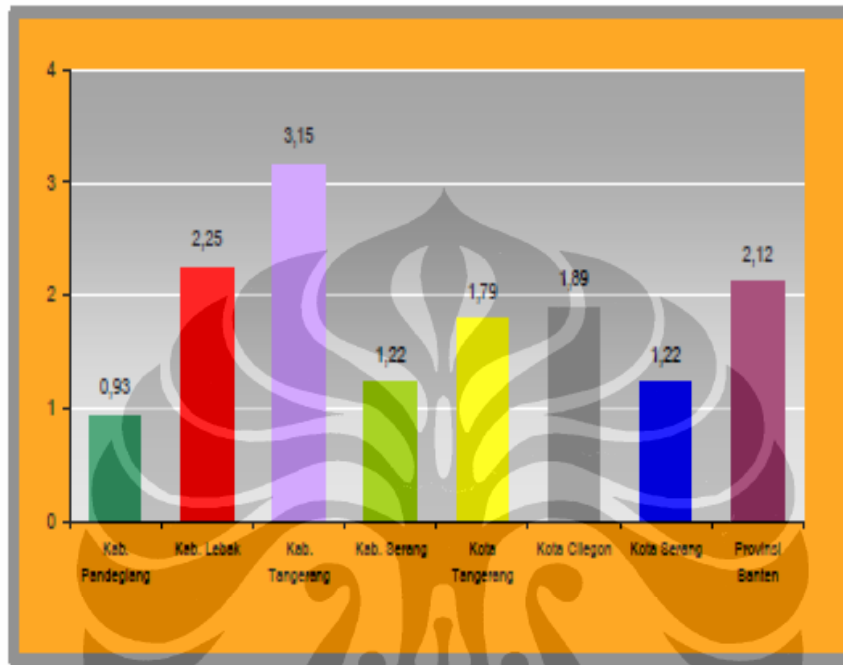
p

Grafik 4.1 Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2009
Figure *Percentage Distribution of Population by Regency/Municipality in Banten Province, 2009*



Sumber / Source : BPS Provinsi Banten, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – Juli 2009
 BPS Statistics of Banten Province, National Socio Economic Survey – July 2009

Grafik 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen), 2000 – 2009
Figure Population Growth Rate by Regency/Municipality in Banten Province (percent), 2000 – 2009



Sumber / Source : BPS Provinsi Banten, Sensus Penduduk 2000 dan Susenas, Juli 2009
 BPS Statistics of Banten Province, 2000 Indonesian Population Census and National Socio Economic Survey, July 2009

3.2. Pembangunan Propinsi Banten.

Dalam pembangunan wilayah di Provinsi Banten sebagaimana dalam buku *Banten dalam angka* yang merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang komprehensif yang meliputi pembangunan wilayah pada sector - sektor yaitu antara lain :

3.2.1. Sektor industri

Bahwa lebih dari 50 % struktur perekonomian Provinsi Banten saat ini bertumpu pada sektor industri dan jasa. Namun demikian nilai ekonomi tinggi yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut belum sejalan dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dilain pihak, kemampuan masyarakat secara keseluruhan belum mendukung untuk

dikerahkan dalam kegiatan usaha industri dan jasa yang menuntut keahlian dan profesionalisme kerja. Selain itu, tingkat pemanfaatan sumberdaya lokal yang berkembang saat ini masih rendah, sehingga dapat dikatakan multiplier effect yang diberikan sektor industri dan jasa belum signifikan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya¹.

Dalam sektor industri pengolahan adalah merupakan sektor ekonomi yang selalu mendominasi perekonomian Banten dan ditopang oleh berbagai perusahaan industri besar dan sedang (IBS) yang terkonsentrasi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan, yang mencakup sekitar 97,56 persen dari total perusahaan IBS di Banten yang pada tahun 2008 mencapai 1.804 perusahaan.

Disamping itu, IBS Banten secara spasial mempunyai ciri khas tersendiri. IBS dengan teknologi padat modal khususnya untuk produk kimia dan besi baja terkonsentrasi di berbagai kawasan industri yang terletak di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang bagian barat. Sedangkan IBS berteknologi padat tenaga kerja umumnya terkonsentrasi diberbagai kawasan industri yang terletak di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Serang bagian timur. Meskipun demikian, IBS berbasis sumber daya alam juga banyak terdapat di Banten dan tersebar merata di berbagai kabupaten/kota di Banten, Sedangkan yang terkecil oleh industry daur ulang dengan nilai tambah hanya 24,07 milyar rupiah.

Secara spasial, nilai tambah terbesar secara berurutan diberikan IBS yang berlokasi di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan yaitu dengan nilai tambah masing-masing sebesar 26,69 trilyun rupiah; 18,98 trilyun rupiah; 12,01 trilyun

¹ *Recana Strategis Dinas Kelautan dan Peikanan 2007-2012, Kebijakan pembangunan daerah, hal 76*

rupiah; 10,34 trilyun rupiah dan 2,26 trilyun rupiah. Sisanya, yang hanya sebesar 566,14 milyar rupiah diberikan oleh IBS yang berlokasi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

Dalam bidang energi Provinsi Banten memiliki dua pembangkit yang memproduksi tenaga listrik dan masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuhan di Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, PLN juga memiliki pembangkit listrik berbahan bakar solar yaitu PLTD Pulo Panjang yang khusus melayani kebutuhan tenaga listrik di Pulo Panjang – Kabupaten Serang.

3.2.2. Sektor perdagangan

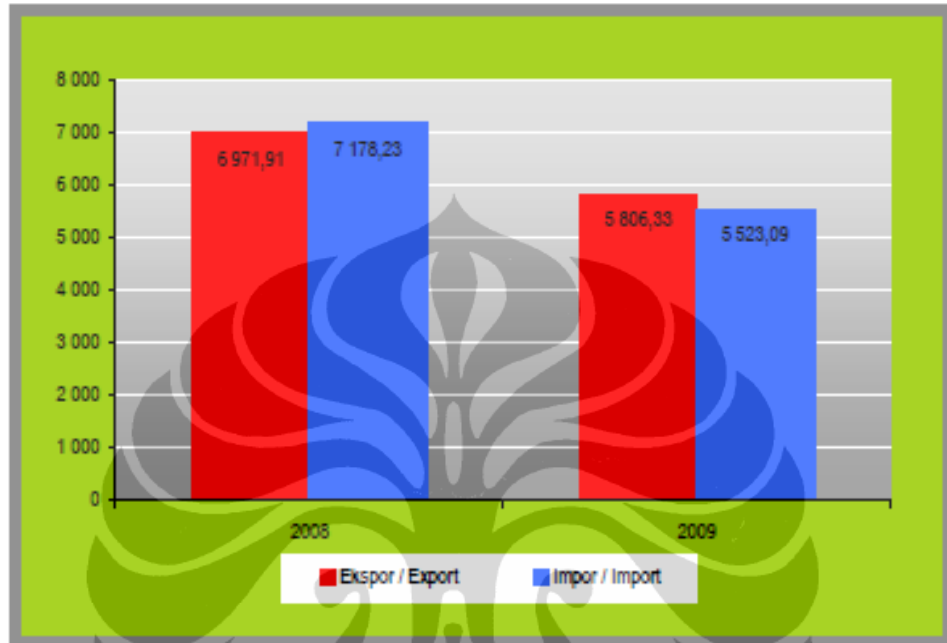
Perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, dalam era globalisasi dewasa ini merupakan suatu keniscayaan. Melalui ekspor, suatu negara dapat menjual berbagai barang dan jasa yang diproduksinya sehingga dapat menambah devisa, meningkatkan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Volume dan nilai ekspor Banten pada tahun 2009 masing-masing mencapai 3,76 juta ton dan 5.806,33 juta USD. Bila diperhatikan komposisinya, ekspor Banten lebih banyak yang dimuat melalui pelabuhan/ bandara diluar Banten terutama melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai 2,08 juta ton dengan nilai 4.798,32 juta USD. Disamping itu, ekspor Banten kebanyakan untuk negara-negara Asia, terutama ke negara-negara ASEAN yaitu sebesar 1,37 juta ton dan 1.279,69 juta USD.

Sedangkan, volume dan nilai impor Banten pada tahun 2009 masing-masing mencapai 10,81 juta ton dan 5.523,09 juta USD. Bila diperhatikan komposisinya, impor Banten lebih

banyak yang dibongkar melalui Pelabuhan Merak yang mencapai 6,00 juta ton dengan nilai 3,72 juta USD. Disamping itu, impor Banten kebanyakan berasal dari Negara-negara Asia, terutama negara-negara ASEAN yaitu sebesar 2,96 juta ton dan 1.791,17 juta USD. Secara individu, impor Banten lebih banyak berasal dari Singapura, China dan Arab Saudi yaitu masing-masing senilai 1.086,84 juta USD; 601,54 juta USD dan 542,66 juta USD. Bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 6.971,91 juta USD, maka ekspor Banten mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 16,72 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh krisis finansial dan ekonomi global yang turut melanda negara-negara mitra dagang utama seperti AS, China dan Jepang, dimana ekspor Banten ke negara-negara tersebut masing-masing mengalami penurunan sebesar 14,62 persen; 13,81 persen dan 30,66 persen. (lihat grafik 8.1)

Grafik 8.1 Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Banten
Figure (juta US\$), 2008-2009
Value of Export and Import of Banten Province
 (million US\$), 2008 -2009



Sumber / Source : BPS Provinsi Banten / BPS Statistics of Banten Province

3.2.3. Aspek Kelautan.

Provinsi Banten memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terbagi menjadi sumberdaya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, sumberdaya yang dapat diperbaharui diantaranya sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional. Sedangkan potensi yang tidak dapat diperbaharui diantaranya adalah sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, terdapat pula berbagai macam jenis jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan peran

pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.²

Provinsi Banten memiliki potensi kelautan dan perikanan dengan potensi besar. Hal ini terlihat dari potensi perikanan pantai, maupun samudera yang dimilikinya. Provinsi Banten memiliki garis pantai sepanjang 517,42 km dengan luas wilayah perairan laut yang berhak dikelola sekitar \pm 11.500 dengan 61 buah pulau-pulau kecil didalamnya. Apabila dibandingkan luas laut yang dimiliki Provinsi Banten lebih luas dari daratannya. Seperti diketahui luas daratan Banten hanya sekitar 8.800,83 km² (*Sumber : Bapeda Provinsi Banten*), Dengan demikian sudah sepantasnya potensi kelautan dan perikanan Provinsi Banten memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banten.

Secara geografis Provinsi Banten memiliki tiga wilayah perairan yang mempunyai tiga karakter yang berbeda, yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah barat Selat Sunda, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Karakteristik sumberdaya ikan pada perairan utara Banten adalah umumnya kelompok ikan pelagis kecil dan perairan selatan mempunyai karakteristik sumberdaya ikan pelagis besar. Sedangkan di Selat Sunda merupakan kombinasi antara keduanya (memiliki karakteristik sumberdaya ikan pelagis besar dan kecil). Besarnya potensi kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Banten seperti telah dikemukakan di atas, merupakan sebuah tantangan besar bagi Pemerintah Propinsi Banten dalam hal ini instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten untuk mengelolanya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Banten.

² *Rencana strategis dinas kelautan dan perikanan propinsi banten tahun 2001-2012* hal 16

Dalam hal transportasi Laut Banten, angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak merupakan salah satu dari kegiatan usaha jasa kepelabuhan yang diberikan oleh pelabuhan umum di Indonesia. Pelabuhan umum menurut statusnya dibedakan antara pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Secara umum, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak pada tahun 2009 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2008 untuk jenis kapal cepat Bakauheni, sedangkan untuk jenis kapal cepat Ro-Ro justru meningkat. Pada tahun 2009 jumlah trip kapal cepat Bakauheni sebanyak 1.290 trip, sedangkan kapal cepat Ro-Ro mencapai 26.317 trip. Hanya saja, jumlah penumpang yang diangkut baik oleh kapal cepat Bakauheni maupun oleh kapal cepat Ro-Ro sama-sama mengalami penurunan masing-masing dari 100.385 orang dan 1.604.312 menjadi 84.974 orang dan 1.511.653. Jumlah kendaraan yang diangkut pada tahun 2009 juga menurun dari 1.658.757 unit menjadi 1.644.354 unit. (Lihat Tabel 9.3.1)

Tabel 9.3.1 **Data Tahunan Angkutan Penyeberangan Merak-Bakahuni di Pelabuhan Merak, Provinsi Banten, 2007-2009**
Annual Data of Merak-Bakahuni Ferry Transport At Merak Port, 2007-2009

Uraian Description	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah Trip / Total Trip	23 761	26 580	27 607
a. Kapal Cepat / Fast Ship	2 490	1 302	1 290
b. Kapal Ro-Ro / Ferry Ship	21 271	25 278	26 317
2. Penumpang / Passenger	1 638 416	1 704 697	1 596 627
a. Kapal Cepat / Fast Ship	164 536	100 385	84 974
1). Bisnis Dewasa / Adult - Bussines Class	155 113	93 689	79 106
2). Bisnis Anak / Children - Bussines Class	9 423	6 696	5 868
3). Kelas lainnya / Other Class	-	-	-
b. Kapal / Ship Ro-Ro	1 473 880	1 604 312	1 511 653
1). Ekonomi B Dewasa / Adul-B Ec. Class	1 385 285	1 507 655	1 398 580
2.) Ekonomi B Anak / Children-B. Ec. Class	88 595	96 657	113 073
3). Kelas lainnya / Other Class	-	-	-
3. Kendaraan / Vehicles	1 424 079	1 658 757	1 644 354
a. Golongan I / Group I	-	13	31
b. Golongan II / Group II	-	239 310	255 200
c. Golongan III / Group III	195 947	123	241
d. Golongan IV Pnp / Passenger – Group IV	381 825	469 182	487 852
e. Golongan IV Brg / Goods – Group IV	107 767	120 078	80 114
f. Golongan V Pnp / Passenger – Group V	20 405	22 218	21 657
g. Golongan V Brg / Goods – Group V	263 609	280 680	270 781
h. Golongan VI Pnp / Passenger – Group VI	56 128	69 236	67 895
i. Golongan VI Brg / Goods – Group VI	307 668	346 138	342 683
j. Golongan VII / Group VII	76 161	94 100	104 024
k. Golongan VIII / Group VII	14 569	17 679	13 876
Lain-Lain / Others	-	-	-

Sumber / Source : PT Indonesia Fery (Persero) – Pelabuhan Merak, Provinsi Banten
 PT Indonesia Fery (Persero) – Merak Port, Banten Province

Berdasarkan urusan pokok yang ditangani Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, maka kondisi atau potensi kelautan dan perikanan dapat digambarkan dalam beberapa sub sektor meliputi :

1. Perikanan tangkap.
2. Perikanan budidaya.
3. Pengawasan dan Pengendalian sumber daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pembinaan usaha bidang kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau pulau kecil.

Peraturan yang mengatur perikanan di Provinsi Banten bersumber pada Undang-undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang menyangkut dengan daerahnya terkait masalah pengelolaan perikanan yang diharapkan pemerintah dan segenap komponen masyarakat di Propinsi Banten dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan optimal tanpa harus mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan.

Sementara pendapatan perkapita masyarakat nelayan di Provinsi Banten pada tahun 2009 pada seluruh kabupaten yang ada diwilayah Banten rata-rata mencapai Rp. 5.933.000,- perorang setiap tahunnya, hal ini masih tergolong pada pendapatan masyarakat yang masih rendah dibawah UMR jika dikatagorikan nelayan tersebut adalah karyawan swasta. Data tersebut dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13 Pendapatan Rata-rata Nelayan, 2009

LOKASI	LAUT			PU		
	Nilai Produksi (Ribu Rp.)	Nelayan (Orang)	Pendapatan Rata-rata (Ribu Rp/Org/Th)	Nilai Produksi (Ribu Rp.)	Jumlah RTP	Pendapatan Rata-rata (Ribu Rp/Org/Th)
Kab. Lebak	30.381.041	3.460	8.781	1.038.125	525	1.977
Kab. Pndglg	222.751.521	5.232	42.575	-	-	-
Kab. Serang	84.537.351	967	87.422	2.969.000	93	31.925
Kab. tgrg	233.076.519	12.100	19.263	579.334	155	3.738
Kota Serang	24.371.900	1.225	19.895	-	-	-
Kota Cilegon	2.993.136	694	4.313	-	-	-
Provinsi Banten	598.111.468	23.678	25.260	4.586.459	773	5.933

3.2.4. Infrastruktur Propinsi Banten

Dalam hal infrastruktur yang ada diwilayah Banten, masih di nilai infrastruktur di Banten adalah merupakan bidang yang paling buruk dibandingkan dengan bidang yang lain seperti kesehatan dan pendidikan. Sebagai salah satu indikator buruknya pembangunan infrastruktur adalah masih banyak ditemukan jalan-jalan yang rusak di Banten. Begitu juga dengan jalan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) juga terlihat buruk. Selain infrastruktur, tingkat pendidikan di Banten masih rendah. Hal itu terlihat masih banyak penyandang buta aksara di Banten, terlebih di daerah pedalaman, berbagai program di segala bidang tidak berjalan optimal.³

³. www/http.. *Infrastruktur di Banten Dinilai Gagal*, Radar Banten, Kamis, 31-Desember-2009

Berbagai program Pemprov yang gagal di 2009 antara lain pemberantasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta pengangguran.

3.3. Optimalisasi Sumberdaya Kelautan Propinsi Banten.

a. Pengelolaan sumberdaya kelautan.

Potensi sumber daya laut yang sangat besar di Provinsi Banten, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya ikan khususnya dan umumnya menjaga kelestarian biota laut perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatannya antara lain melalui Izin Usaha Perikanan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian secara optimal serta berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat. Berdasarkan cara pengusahanya, perikanan digolongkan menjadi dua yaitu : perikanan tangkap langsung dari alam, misalnya penangkapan ikan air laut, sungai, danau, atau air payau. Perikanan yang diusahakan secara intensif di kolam ikan danau (waduk), tambak, sawah, dan keramba.

Berdasarkan besar kecilnya modal usaha perikanan digolongkan menjadi dua, yaitu perikanan rakyat dan perikanan industri. *Perikanan rakyat* adalah perikanan yang dilakukan oleh para nelayan atau pemelihara ikan dengan sedikit modal dan peralatan yang sederhana. biasanya hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. *Perikanan industri* adalah perikanan yang diusahakan dengan modal besar dan pengelolaan yang modern (maju) usahanya ditujukan untuk keperluan ekspor. Daerah penangkapannya jauh dilepas pantai dan untuk penangkapannya harus

menggunakan kapal penangkap ikan yang berukuran besar dan canggih.

Program kedepan dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan di Provinsi Banten akan dioptimalkan pada wilayah penangkapan ikan diatas 7 mil dari permukaan laut, karena pada wilayah penangkapan ikan 7 mil tersebut sudah mengalami degradasi dan merusak kondisi laut lainnya, sehingga keberadaan ikan pada zona itu sudah semakin menurun.

Dalam pembangunan perikanan tersebut rakyatlah yang mendapatkan prioritas. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa kurang lebih 90% perikanan di Indonesia adalah perikanan rakyat. Pembangunan perikanan dalam arti luas terus ditingkatkan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi (penganekaragaman) dan rehabilitasi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi yang pada akhirnya dapat mempertinggi pendapatan petani/nelayan, memperluas lapangan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Dengan demikian sektor perikanan akan menjadi kuat dalam mendukung pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Disamping sebagai salah satu cara pengendalian sumber daya perikanan perizinan usaha perikanan diharapkan akan menjadi sumber pendapat asli daerah. (PAD), struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan diatur dalam Perda Provinsi Banten nomor 6 tahun 2004. d (*terlampir*). Dasar untuk penentuan tariff atas izin usaha perikanan adalah jenis alat penangkapan, jenis air, dan ukuran.

Provinsi banten dalam Kewenangan pengelolaan sumber daya laut sebagaimana mendasari pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Pengelaolaan sumberdaya kelautan diwilayah pesisir sebagaimana dalam peraturan daerah Provinsi Banten mengatakan bahwa dalam bidang perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perkonomian nasional maupun regional terutama dalam meningkatkan perluasan

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya nelayan kecil pembudidayaan ikan kecil dan para pelaku usaha dibidang perikanan.

b. Pemanfaatan pulau-pulau di Propinsi Banten.

Sebagaimana pulau-pulau kecil yang ada diwilayah Indonesia mempunyai arti penting sebagai fungsi Pertahanan dan Keamanan serta mempunyai fungsi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan suatu wilayah. Propinsi Banten memiliki 51 buah pulau baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni.

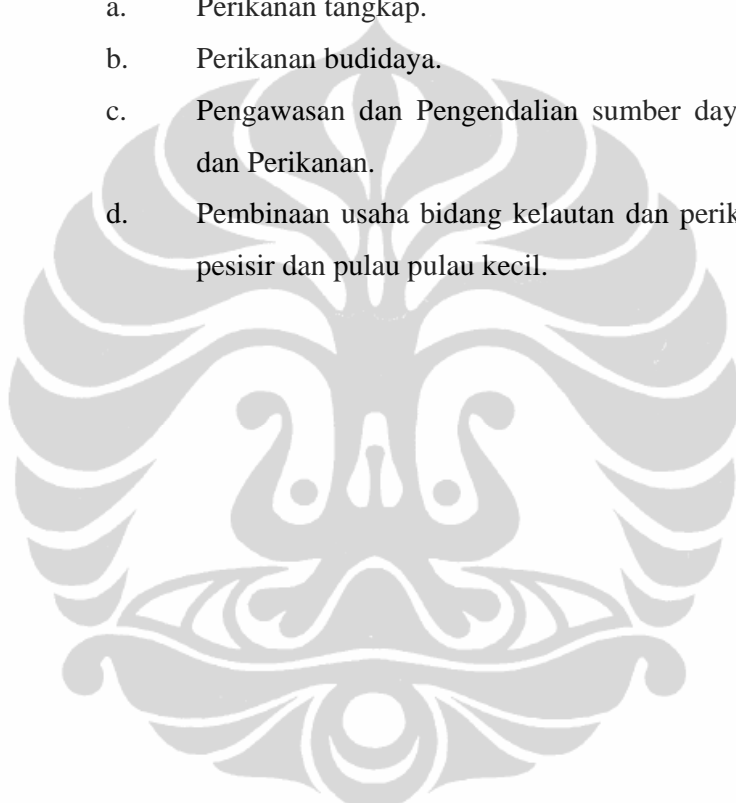
Dikatakan sebagai fungsi keamanan adalah bahwa pulau-pulau kecil terutama di bagian terluar suatu wilayah perairan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang yang merupakan jalur masuknya kapal-kapal ke Indonesia. Misalnya pulau Sanghiang di kabupaten Serang Propinsi Banten dimana pulau tersebut merupakan pulau yang dapat dijadikan lokasi pengamatan kapal-kapal Asing yang melintas di wilayah perairan Banten karena Pulau Sanghiang terdapat jalur ALKI yang dilalui oleh kapal-kapal asing dan sebagai pengawasan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal, narkoba, senjata, dan obat-obatan terlarang yang menggunakan jalur laut diwilayah perairan Banten.

Sebagai fungsi ekonomi terhadap pulau-pulau kecil yang ada diwilayah Banten, memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang berbasis pada sumberdaya (*resource based industry*) seperti pada pulau Tinjil di Kabupaten Pandegelang Provinsi Banten, dimana pada pulau tersebut selama ini terdapat penangkaran kera yang dikelola oleh sebuah perusahaan milik swasta (PT. Varian Variates) yang mengembangkan penangkaran kera sebagai objek penelitian medis, namun pengelolaan tersebut belum dapat mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, mengingat sumberdaya manusia yang sebagian besaar didatangkan dari luar

sehingga disinyalir keberadaan pulau tersebut pemanfaatannya lebih banyak dieksploitasi pihak asing.

Berdasarkan urusan pokok yang ditangani Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, maka kondisi atau potensi kelautan dan perikanan dapat digambarkan dalam beberapa sub sektor meliputi :

- a. Perikanan tangkap.
- b. Perikanan budidaya.
- c. Pengawasan dan Pengendalian sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- d. Pembinaan usaha bidang kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau pulau kecil.



BAB 4

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. Permasalahan Pembangunan Provinsi Banten

Masalah yang timbul dalam upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan atau pesisir di Provinsi Banten terdiri dari beberapa aspek yang diuraikan melalui hasil penelitian pada dua diwilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Pandegelang dan Kabupaten Serang. Yaitu sebagai berikut :

4.1.1. Kondisi di Kabupaten Serang Provinsi Banten

Wilayah Serang terdiri dari dua belas Kecamatan yang terletak diwilayah pesisir dengan luas perairan 814 km², dan berbatasan sebelah utara Laut Jawa dan Kota Serang, sebelah selatan Kabupaten Pandegelang dan Kabupaten Lebak, sebelah barat Kota Cilegon, dan sebelah timur Kabupaten Tangerang. Dari dua belas Kecamatan yang ada di wilayah Serang peneliti melakukan pengamatan di pelabuhan Karangantu Kecamatan Kasemen, mengingat wilayah tersebut adalah merupakan pelabuhan yang sarat dengan kegiatan penangkapan ikan dan termasuk pelabuhan nusantara.

Dalam aspek kebijakan, melihat dari Undang-undang perikanan bagi masyarakat nelayan Karangantu dirasa dapat menaungi dan mewedahi serta memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat, namun terhadap aturan dan kebijakan daerah baik itu provinsi maupun Kabupaten perlu adanya keterlibatan pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam memberikan pemahaman tentang perikanan modern seperti pemahaman kepada masyarakat nelayan tentang sosialisasi mengenai Ekologi, tehnik membaca peta laut dengan benar, bagaimana mengatasi bila terjadi bencana alam dilaut dan bagaimana tehnik mengatasi bila terjadi perampokan di daerah operasi para nelayan.

Yang tentunya sosialisasi ini dilakukan oleh instansi yang terkait. Dan dalam proses perizinan masih tergolong lambat dalam

penyelesaiannya. Hal ini disebabkan karena adanya birokrasi yang tidak profesional dilingkungan instansi yang menanganinya.

Dalam hal kebijakan retribusi yang di keluarkan oleh para nelayan dan Bakul (juragan ikan) kepada TPI adalah sebesar 5% dengan alokasi dana tersebut adalah 3% untuk kas daerah Kabupaten Serang dan 2 % untuk kas pengelola TPI Karangantu, sedangkan untuk dana sukarela dipungut dari para Nelayan dan para Bakul (juragan ikan) oleh TPI sebesar 3% yang alokasi dana tersebut adalah diperuntukan dana social dan operasional nelayan di TPI Karangantu. Melihat dari kebijakan tersebut dengan adanya retribusi yang demikian pemerintah kabupaten masih belum bisa mendukung sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ada di Kecamatan Karangantu,

Dalam hal kebijakan perizinan sebagaimana yang diatur daalam Perda Propinsi Banten Nomor 6 tahun 2004 tentang perizinan usaha perikanan, kebijakan yang berlaku di wilayah Serang khususnya mengenai SIB (surat ijin berlaya) bagi kapal-kapal ikan yang akan melaut, masih sama halnya dengan yang terjadi di Labuhan yaitu terjadi tumpang tindih kewenangan antara syahbandar perikanan dan syehbandar perhubungan. Yang seharusnya izin berlayar bagi kapal-kapal penangkap ikan dikeluarkan oleh syahbandar perikanan, sedangkan izin berlayar bagi kapal-kapal niaga dikeluarkan oleh syahbandar perhubungan laut, namun demikian syahbandar pehubunagn laut tetap melaksanakan proses penerbitan SIB bagi kapal-kapal penangkap ikan, sehingga dengan demikian biaya perizinan yang harus dikeluarkan oleh para nelayan akan lebih banyak karena para nelayan harus mengeluarkan biaya retribusi perizinan kepada syahbandar perikanan, syahbandar perhubungan laut dan pihak keamanan setempat.

Disamping adanya pengeluaran retribusi yang demikian, proses pengesahan perizinan yang dilakukan oleh instansi yang menanganinya masih tergolong lambat. Dengan desakan waktu dan pengaruh cuaca diwilayah pesisir sementara proses pengesahan SIB berlangsung lambat, sehingga nelayan akhirnya meninggalkan SIB

yang sedang dalam proses tersebut selesai, yang tentunya akan merugikan nelayan juga karena terkadang nelayan harus berhadapan dengan petugas karena kelengkapan surat izin berlayar dari kapal yang digunakannya tidak lengkap.

Dalam hal penggunaan alat penangkapan ikan oleh para nelayan, masih banyak nelayan Karangantu yang menggunakan alat tangkap dengan jenis jaring yang dilarang oleh ketentuan daerah seperti jaring jenis Trawl atau Arad. Memang nelayan Karangantu dalam penggunaan alat tangkap sudah sesuai dengan yang dianjurkan yaitu jenis jaring Dogol, namun oleh nelayan jaring tersebut dimodifikasinya menyerupai jaring Trawl yaitu dengan menambahkan swing/sayap pembuka pada bagian jaring. Hal ini dilakukan karena harapan nelayan setempat dapat mencapai hasil tangkapan yang maksimal.

Dalam aspek Pembinaan organisasi, terhadap sarana dan prasarana. Untuk wilayah Karangantu dalam kegiatan pelelangan ikan memiliki 1 unit TPI (Tempat Pelelangan Ikan) namun dipelabuhan perikanan Karangantu ini belum adanya dermaga yang memadai untuk kegiatan bongkar muat hasil tangkapan ikan para nelayan. Alur-alur sungai yang biasa dilalui oleh kapal-kapal ikan menuju TPI banyak terdapat timbunan lumpur yang menyebabkan kedangkalan air sungai pada saat air laut surut dan bangkai-bangkai kapal kayu yang usianya cukup lama. Hal ini menjadi kendala bagi kapal-kapal yang melintas menuju pelabuhan diwilayah karangantu.

Operasional nelayan. Dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh para nelayan Karangantu, kebutuhan BBM yang digunakan untuk melaut bagi para nelayan terkadang masih mengalami kesulitan untuk didapatkan. Hal ini disebabkan karena distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina cukup jauh dari lokasi pelabuhan kapal-kapal ikan dan dilokasi pelabuhan tersebut tidak tersedianya SPBU kusus kapal nelayan, sehingga para nelayan dalam

pengadaan BBM tersebut harus mendatangkan dari luar dengan harga yang sedikit lebih mahal.

Kemudian dalam hal hasil tangkapan ikan yang perlu adanya pengawetan untuk hasil tangkapan ikan nelayan tetap segar melalui proses pendinginan ICE/ES, nelayan Karangantu harus membelinya ICE tersebut di wilayah yang ajuh dari pelabuhan Karangantu itu pun dengan jumlah yang masih terbatas. Sementara dipelabuhan Karangantu terdapat pabrik ICE milik pemerintah setempat, namun keberadaanya sampai saat ini tidak difungsikan.

Dalam aspek geografi, bahwa keberdaan ikan didalam laut wilayah Propinsi Banten khususnya wilayah perairan Karangantu juga saat ini sudah sangat berkurang ketersediaanya, termasuk pertumbuhan trumbukarang dan rumput laut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain :

- a. Adanya pencemaran laut yang disebabkan dari limbah kapal - kapal niaga yang membuang langsung limbah tersebut kelaut, seperti oli kotor dan bahan bakar kapal akibat kebocoran tangki bahan bakar kapal.
- b. Kurangnya keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pemahaman tentang pengetahuan bidang ekologi kepada seluruh masyarakat nelayan.
- c. Degradasi lingkungan bawah laut yang semakin parah, hal ini disebabkan karena pelaku penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak dan potasium serta alat jaring yang dilarang hal tersebut sering dilakukan oleh para nelayan yang kurang memahami ekologi sehingga dengan demikian dapat merusak ekosistem di dalam dan di dasar laut.

Ekonomi. Dalam hal kesejahteraan masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Karangantu, masih tergolong memiliki

kesejahteraan yang rendah. Hal ini dapat terlihat dari kondisi perekonomian keluarga nelayan di Karangantu yaitu sebagai berikut :

a. Armada penangkapan ikan, armada kapal-kapal ikan yang ada di wilayah Karangantu sebanyak 574 unit kapal ikan dengan 10% kapal ikan yang berukuran 5 sampai dengan 10 Gt. (Gros Ton) selebihnya didominasi dengan kapal-kapal ikan yang berukuran kecil. Kapal-kapal ikan di Karangantu juga tergolong dalam kategori kapal ikan yang sudah cukup tua usia pakainya, sehingga banyak membutuhkan perawatan-perawatan ekstra dan seringnya mengalami kerusakan mesin pada saat beroperasi dilaut dalam mencari ikan. Kapal yang digunakan untuk kegiatan dalam usahanya menangkap ikan oleh nelayan Karangantu, pada proses pengadaanya armada tersebut tidak bedanya dengan pengadaan kapal seperti diwilayah Labuhan yaitu melalui pembelian dan pembuatan dengan modal 50% milik nelayan dan sebagian 50% lagi milik juragan.

Dan selama nelayan belum bisa mengembalikan modal yang dipinjam sebesar 50% dari juragan, maka dari hasil kegiatan nelayan tersebut harus diserahkan sebesar 10% kepada juragan sebagai keuntungan/bunga dari pinjaman modal yang digunakan oleh nelayan pada saat pengadaan armada hal tersebut berjalan sampai nelayan mampu mengembalikan pinjaman modal tersebut.

b. Pelele/Juragan ikan. Dengan adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh para nelayan, untuk kegiatan melaut yang harus dilakukan oleh nelayan pada saat itu, dalam kondisi yang sangat membutuhkan modal untuk mendukung biaya operasional melaut, maka nelayan terpaksa harus meminjam modal operasional tersebut kepada Pelele yang memiliki modal, dengan konsekwensi seluruh hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan saat

itu harus dijual kepada palele dengan harga yang disesuaikan dan tidak boleh dijual kepada pihak lain atau dijual melalui TPI setempat.

Hal ini dapat merugikan beberapa pihak disatu sisi TPI tidak mendapatkan kontribusi atas retribusi dari hasil tangkapan ikan nelayan, karena hasil tangkapan ikan disetorkan langsung kepada Pelele ditengah laut. Disisi lain TPI tidak mendapatkan kontribusi atas hasil tangkapan ikan diwilayah laut Karangantu oleh nelayan.

c. Dukungan pemerintah, bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan, terapat waktu-waktu tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh nelayan dalam kegiatannya mencari ikan, sebagaimana dilingkungan masyarakat nelayan Karangantu mengenal adanya musim barat/peceklik, dimana pada musim tersebut ada beberapa nelayan yang tidak berani melakukan aktifitas menangkap ikan dilaut seperti biasanya, karena pada musim tersebut keadaan cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaut, namun tidak seburuk yang terjadi di wilayah Labuhan Kabupaten Pandegelang.

Dalam kondisi cuaca yang demikian terdapat beberapa nelayan tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarganya sebagaimana yang biasa dilakukan pada kondisi alam yang memungkinkan atau cuaca yang mendukung. Kondisi ini berlangsung tidak terlalu lama. Namun demikian tidak banyak yang dapat diperbuat oleh nelayan Labuhan untuk mengisi kekosongan kegiatan tersebut. Paling tidak nelayan merubah profesinya sementara sebagai tukang kayu, tukang ojek dan buruh bangunan.

Sebagaiman yang diketahui oleh para seluruh masyarakat nelayan Karangantu, sama halnya dengan masyarakat nelayan Labuhan yaitu bahwa pada saat musim barat pada masa orde baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Suharto, masyarakat nelayan pada

musim demikian mendapatkan dukungan dana peceklik dalam bentuk uang atau sembako dari pemerintah pusat sesuai dalam Kepres nomor 6 tahun 1988 tentang dukungan dana peceklik. Namun seiring berjalannya reformasi dukungan tersebut tidak dirasakan lagi oleh para nelayan Karangantu.

Dalam aspek budaya, semua aspek kehidupan masyarakat setempat yang berada dibawah ruang lingkup hukum adat yang berlaku, masyarakat diwilayah Karangantu termasuk masyarakat yang patuh dengan aturan yang ada, sebagaimana diketahui masyarakat nelayan setempat sangat takut sekali berhadapan dengan petugas sehingga sedapat mungkin mereka mematuhi segala aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Semua rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan wilayah pesisir masih memperhatikan budaya setempat, seperti kegiatan-kegiatan sakral yang biasanya dilakukan oleh segenap masyarakat pesisir yaitu Ruatan laut, diwilayah Karangantu masih menghormati dan tetap mengadakan kegiatan tersebut.

Dalam aspek Lembaga Swadaya Masyarakat, Himpunan masyarakat nelayan seluruh Indonesia adalah merupakan suatu lembaga yang terdaftar dalam lembar Negara Republik Indonesia dan diakui secara nasional kedudukannya. HNSI yang ada diwilayah Serang khususnya Karangantu ada berperan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan para nelayan yang ada Karangantu, bahkan dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Wisma Elang laut Jakarta yang diselenggarakan oleh Purn Laksamana Yusuf Syahroni sebagai ketua HNS Pusat bersedia hadir yang kemudian disampaikan kepada segenap perwakilan para nelayan yang berada di wilayah Serang.

Selain HNSI dilingkungan masyarakat pesisir pada umumnya juga terdapat organisasi masyarakat dalam bentuk koperasi. Sebagaimana koperasi yang ada di wilayah Karangantu saat ini diambil

alih kegiatan usahanya oleh pihak swasta. Koperasi tersebut sampai saat ini berjalan dengan baik mengingat ketersediaan dana didukung oleh pihak swasta. Sehingga keberadaanya dapat mendukung kegiatan operasional nelayan di Karangantu.

4.1.2. Kondisi di Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten.

Wilayah Pandeglang terdiri dari sepuluh Kecamatan yang terletak diwilayah pesisir dengan luas perairan 1.702 km², dan berbatasan sebelah utara Kabupaten Serang, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, dan sebelah timur Kabupaten Lebak. Dari sepuluh Kecamatan yang dilakukan penelitian dalam pengkajian ini adalah pelabuhan perikanan Labuhan Kecamatan Muara, mengingat wilayah tersebut adalah merupakan pelabuhan yang cukup ramai dengan kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan.

Dalam aspek kebijakan Undan-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bagi masyarakat nelayan Labuhan dirasa dapat menaungi dan mewadahi serta memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat, namun terhadap aturan dan kebijakan daerah baik itu propinsi maupun kabupaten dalam sosialisasi oleh instansi yang terkait belum secara optimal dapat diterima dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat nelayan labuhan. Hal ini disebabkan karena pelibatan dalam sosialisasi tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang saja dan tidak bisa diserap atas apa yang diberikan dalam sosialisasi dan mengaplikasikannya dilapangan.

Kebijakan retribusi. Dalam hal kebijakan retribusi yang di keluarkan oleh para nelayan kepada TPI adalah sebesar 6% dengan alokasi dana tersebut adalah 4% untuk kas daerah Kabupaten dan 2 % untuk kas pengelola TPI, sedangkan untuk para Bakul (juragan ikan) ada retribusi tersendiri kepada TPI yaitu sebesar 3%. Namun seiring berjalannya kebutuhan para nelayan, TPI memungut 2% lagi dari para

nelayan dan parai Bakul (juragan ikan) yang alokasi dana tersebut adalah merupakan dana simpanan yang ada di TPI yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan Nelayan dan Bakul di TPI Muara Labuhan.

Meskipun besaran pungutan retribusi yang dikeluarkan oleh para nelayan Labuhan lebih besar jika dibandingkan dengan nelayan Panimbang dan nelayan Binuangen, namun sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ada di Kecamatan Pandimbang dan Binuangen, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang ada di wilayah Labuhan. Pada umumnya hasil tangkapan ikan yang berasal dari wilayah pelabuhan Labuhan propinsi Banten dalam pendistribusianya sampai ke beberapa wilayah disekitar lampung, Sumatra, Jakarta dan bogor

Kebijakan perizinan. Dalam hal perizinan yang berlaku di wilayah Labuhan khususnya mengenai SIB (surat ijin berlayar) bagi kapal-kapal ikan yang akan melaut, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara syahbandar perikanan dan syehbandar perhubungan. Yang seharusnya izin berlayar bagi kapal-kapal penangkap ikan dikeluarkan oleh syahbandar perikanan, sedangkan izin berlayar bagi kapal-kapal niaga dikeluarkan oleh Syahbandar perhubungan laut namun demikian Syahbandar pehubunagn laut tetap melaksanakan proses penerbitan SIB bagi kapal-kapal penagkap ikan, sehingga dengan demikian biaya perizinan yang harus dikeluarkan oleh para nelayan akan lebih banyak karena para nelayan harus mengeluarkan biaya retribusi perizinan kepada syahbandar perikanan, syahbandar perhubungan laut dan pihak keamanan setempat dalam hal ini Polair. Disamping adanya pengeluaran retribusi yang demikian, proses pengesahan perizinan yang dilakukan oleh instansi yang menanganinya masih lambat sehingga dengan desakan waktu dan pengaruh cuaca diwilayah pesisir yang akhirnya nelayan akan tidak sabar menunggu dan akhirnya meninggalkan SIB yang sedaang dalam proses tersebut selesai, yang tentunya akan merugikan nelayan juga

karena terkadang nelayan harus berhadapan dengan petugas karena kelengkapan surat izin berlayar dari kapal yang digunakannya tidak lengkap.

Dalam hal penggunaan alat penangkapan ikan oleh para nelayan, masih banyak nelayan Labuhan yang menggunakan alat tangkap dengan jenis jaring yang dilarangan oleh ketentuan daerah seperti jaring jenis Trawl atau Arad. Alasan nelayan banyak menggunakan jenis alat tangkap yang demikian, karena jenis alat tangkap seperti ARAD atau Trawl dalam pengadaanya tidak banyak membutuhkan biaya yang besar, sedangkan jenis alat tangkap yang dibolehkan tersebut dalam pengadaanya membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh para nelayan.

Dalam aspek pembinaan organisasi, sarana dan prasarana. Untuk wilayah Labuhan dalam kegiatan pelelangan ikan memiliki 2 unit TPI (Tempat Pelelangan Ikan) namun dari keua TPI tersebut hanya digunakan satu unit saja yaitu di labuhan kelurahan teluk. Hal tersebut disebabkan karena TPI yang baru dibangun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan tidak memiliki dermaga sehingga kesulitan bagi para nelayan apabila akan melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan para nelayan, sehingga TPI yang saat ini digunakan oleh para nelayan Labuhan adalah TPI yang terletak di Kelurahan Muara Labuhan itupun dengan keadaan dermaga tidak sesuai dengan keadaan air pada saat pasang dan surut dan tidak memenuhi standar bagi kapal-kapal penangkapan ikan. Hal ini disebabkan pada saat pembuatan dermaga dimaksud pihak Dina Kelautan dan Perikanan tidak berkordinasi dengan pihak yang terkait diwilayah Labuhan.

Dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh para nelayan labuhan, kebutuhan BBM yang digunakan untuk melaut bagi para nelayan terkadang masih sulit untuk didapatkan. Hal ini disebabkan karena distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina sangat terbatas di SPBU Labuhan, sehingga apabila stok BBM di SPU Labuhan habis, sementara nelayan harus melaut, maka para nelayan harus mencari

BBM di lokasi luar SPBU dengan harga yang lebih mahal. Kemudian dalam hal hasil tangkapan ikan yang perlu adanya pengawetan melalui proses pendinginan melalui ICE, nelayan Labuhan harus mendatangkan ICE tersebut dari luar wilayah Labuhan dan itu pun dengan jumlah yang masih terbatas.

Dalam aspek geografi. Keberadaan ikan didalam laut wilayah Propinsi Banten khususnya wilayah perairan Labuhan sudah sangat berkurang ketersediaanya, termasuk pertumbuhan trumbukarang dan rumput laut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain :

- a. Adanya pencemaran laut yang disebabkan dari limbah kapal - kapal niaga yang membuang langsung limbah tersebut kelaut, seperti oli kotor dan bahan bakar kapal akibat kebocoran tangki bahan bakar kapal.
- b. Limbah pabrik yang berada dekat wilayah pesisir, limbah tersebut berupa bahan-bahan kimia yang pembuangannya langsung ke laut, tidak melalui filter sterilisasi limbah perusahaan.
- c. Pelaku penangkapan ikan yang dalam kegiatannya menggunakan bahan peledak dan potasium serta alat jaring yang dilarang, sehingga dari kegiatan tersebut akan merusak kondisi ekosistem yang ada di dalam air dan dasar laut.

Dalam aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Labuhan, masih tergolong memiliki kesejahteraan yang rendah. Hal ini dapat terlihat dari kondisi perekonomian keluarga nelayan di Labuhan yaitu sebagai berikut.

- a. Sarana tinggal atau pemukiman para nelayan. Sampai saat ini kurang lebih sekitar 70% sarana tinggal para nelayan masih menggunakan tanah/lahan milik pemerintah daerah setempat, artinya bahwa sebesar sarana tinggal para nelayan

yang beradal dipesisir wilayah labuhan berdiri diatas tanah/lahan milik Dinas Kelautan dan Perikanan. Mereka tidak memiliki bukti kepemilikan atan tanah dimaksud. Sehingga apabila nelayan akan akan mengembangkan usahanya dengan mengajukan pinjaman modal atas usaha penangkapan ikan tersebut kepada pihak Bank, maka akan terbentur pada masalah jaminan/agunan yang dimilikinya.

b. Pada armada kapal-kapal ikan yang ada di wilayah Labuhan kebanyakan tergolong dalam katgori kapal ikan yang sudah cukup tua sehingga banyak membutuhkan perawatan-perawatan ekstra dan seringnya mengalami kerusakan mesin pasa saat beroperasi mencari ikan.

Kapal yang digunakan untuk kegiatan dalam usahanya menagkap ikan oleh nelayan Labuhan, pada proses pengadaanya armada tersebut melalui pembelian dan pembuatan dengan modal 50% milik nelayan dan sebgian 50% lagi milik juragan. Selama nelayan belum bisa mengembalikan modal yang dipinjam sebesar 50% dari juragan, maka dari hasil kegiatan nelayan tersebut harus diserahkan sebesar 10% kepada juragan sebagai keuntungan/bunga dari pinjaman modal yang digunakan oleh nelayan pada saat pengadaan armada, sementara pokok dari pinjaman tersebut masih tetap sebesar pada saat nelayan itu pinjam yaitu sebesar 50% dari harga kapal yang dibeli/dibuat oleh nelayan. Dan keuntungan 10% kepada juragan tersebut akan berakhir jika nelayan sudah dapat melunasi pinjaman modal itu.

c Adanya Pelele/tengkulak ikan, dari adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh para nelayan, untuk kegiatan melaut yang harus dilakukan oleh nelayan pada saat itu, dalam kondisi yang sangat membutuhkan modal untuk mendukung biaya operasional melaut, maka nelayan terpaksa harus meminjam

modal operasional tersebut kepada Pelele yang memiliki modal. Dengan konsekuensi seluruh hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan saat itu harus dijual kepada palele dengan harga yang disesuaikan dan tidak boleh dijual kepada pihak lain atau dijual melalui TPI setempat.

d. Dukungan pemerintah. Bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan, terapat waktu-waktu tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh nelayan dalam kegiatannya mencari ikan, sebagaimana dilingkungan masyarakat nelayan Labuhan mengenal adanya musim barat, dimana pada musim tersebut para nelayan tidak berani melakukan aktifitas menangkap ikan dilaut seperti biasanya, karena pada musim tersebut keadaan cuaca tidak memungkinkan seperti ; adanya ombak laut yang cukup besar yang disebabkan oleh angin laut yang begitu kencang mendorong ke arah daratan.

Dalam kondisi cuaca yang demikian para nelayan tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarganya sebagaimana yang biasa dilakukan pada kondisi alam yang memungkinkan atau cuaca yang mendukung. Kondisi ini biasanya berlangsung cukup lama. Namun demikian tidak banyak yang dapat diperbuat oleh nelayan Labuhan untuk mengisi kekosongan kegiatan tersebut. Paling tidak nelayan merubah profesinya sementara sebagai tukang ojek, buruh bangunan itupun dilakukan diluar wilayah Labuhan.

Sebagaimana yang diketahui oleh para seluruh masyarakat nelayan bahwa pada saat musim barat pada masa orde baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Suharto, dalam setiap bulannya masyarakat nelayan mendapatkan dukungan dana peceklik dalam bentuk uang atau sembako dari

pemerintah pusat setiap bulanya selama musim barat sesuai disinyalir adanya Kepres yang mengatur tentang bantuan Presiden kepada nelayan pesisir pada musin peceklik. Namun seiring berjalannya reformasi dukungan tersebut tidak dirasakan lagi oleh para nelayan Labuhan khususnya dan para nelayan Indonesia pada umumnya.

Dalam aspek budaya, semua aspek kehidupan masyarakat setempat yang berada dibawah ruang lingkup hukum adat yang berlaku, masyarakat diwilayah Labuhan tidak memberlakukan sama dengan hukum nasional. Semua rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan wilayah pesisir seharusnya memperhatikan budaya setempat. Sebagaimana kegiatan-kegiatan sakral seperti yang biasanya dilakukan oleh segenap masyarakat pesisir seperti Ruatan laut, diwilayah Panimbang sejak beberapa tahun ini tidak mengadakan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor dukungan dana yang tidak ada dan rasa kurangnya rasa solidaritas antara masyarakat setempat.

Dalam aspek Lembaga Swadaya Masyarakat, Himpunan masyarakat nelayan seluruh Indonesia adalah merupakan suatu lembaga yang terdaftar dalam lembar Negara Republik Indonesia dan diakui secara nasional kedudukannya. Namun pada kenyataannya HNSI yang ada diwilayah Labuhan tidak berperan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan para nelayan yang ada di Labuhan, bahkan yang terjadi bertolak belakang dengan para nelayan dalam hal kesepahaman yang berujung pada individualisme.

Selain HNSI dilingkungan masyarakat pesisir pada umumnya juga terdapat organisasi masyarakat dalam bentuk koperasi. Sebagaimana koperasi yang ada di wilayah Labuhan saat ini dapat dikatakan keberadaanya bersifat temporary. Koperasi yang dimaksud adalah Kopersi Unit Desa yang terbentuk seketika bila mana akan menerima bantuan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan. Dan

setelah terlaksananya kegiatan dimaksud Koperasi Unit Desa tersebut akan berangsur-angsur bubar satu demi satu dengan alasan piutang dari anggota koperasi yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar hutang di KUD.

4.2. Analisa tentang dampak kebijakan pemerintah daerah.

Melihat permasalahan yang ada pada masyarakat di wilayah pesisir Banten sebagaimana yang diuraikan dalam bab ini. Dapat digaris bawahi bahwa nelayan Banten yang ada pada umumnya berpeluang untuk menciptakan usaha dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat nelayan cukup besar, namun dalam usaha yang mereka lakukan terbentur pada masalah permodalan atau biaya. Bahwa dalam hal bantuan kredit dari pihak Bank, pihak bank akan melihat secara fisik apa yang bisa dijadikan jaminan atas pinjaman dana bagi usaha nelayan sementara sarana rumah tinggal saja para nelayan setempat masih menggunakan lahan milik instansi pemerintah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya karena tidak dapat menerima bantuan pinjaman modal dari pihak Bank.

Dengan ketidak mampuan mereka dalam memberikan jaminan kepada pihak Bank atas bantuan pinjaman modal usaha, maka mereka dapat dikatakan masyarakat yang tidak layak kredit dalam dunia perbankan. Sementara melihat potensi usaha perikanan dilingkungan pesisir wilayah Banten cukup mempunyai peluang yang besar.

Melihat dari kondisi yang ada perlunya adanya keijakan pemerintah yang memberikan kemudahan para nelayan dalam penyediaan kebutuhan pokok kegiatan usaha perikanan nelayan yang sesuai dengan standarisasi pelabuhan kapal ikan. Sebagaimana adanya sarana dan prasarana SPBU khusus kapal kapal nelayan, sarana TPI yang layak digunakan oleh para nelayan pada saat menjual hasil

tangkapannya, pengadaan pabrik es dilingkungan pelabuhan untuk sarana pengawetan hasil tangkapan ikan nelayan.

Dari penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standarisasi pelabuhan kapal perikanan, maka akan dapat terlihat penggunaan kebutuhan operasional nelayan dengan jumlah yang cukup besar dan hal ini apabila dilaksanakan oleh pemerintah setempat dengan mekanisme yang baik, maka secara ekonomi akan memberikan peningkatan kas daerah melalui retribusi adanya penyediaan sarana dan prasarana tersebut.

Dengan adanya birokrasi pihak Bank yang menghambat para nelayan dalam upaya penerimaan bantuan pinjaman modal usaha dari pemerintah setempat, maka hal ini akan berdampak pada terciptanya kemandirian produksi di wilayah pesisir, sementara peluang untuk adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui usaha perikanan mempunyai potensi yang cukup besar.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan, propinsi Banten mendasari pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan daerah Propinsi Banten. Namun untuk pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi Banten sampai sejauh ini belum ada Perda yang mengaturnya.

Pasca Otonomi Daerah dalam kegiatan sumberdaya kelautan khususnya pengelolaan sumberdaya laut, di Provinsi Banten mempunyai dampak positif. Sebagaimana sebelum diberlakukan Otonomi daerah. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan banyak dilakukan di wilayah Banten untuk kepentingan diluar wilayah Banten itu sendiri, seperti penyedotan pasir laut yang hasilnya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat diluar wilayah Banten seperti Sumatra, Jawa dan Jakarta. Kemudian disisi lain pada wilayah perairan di wilayah Banten pasca otonomi daerah tingkat kerawanan terhadap konflik-konflik antar daerah semakin meningkat seperti perbatasan wilayah penangkapan ikan antar kabupaten. Sebagaimana yang terjadi pada wilayah Karangantu dan pulau Panjang.

Melihat kondisi perairan wilayah Banten yang sudah mengalami degradasi yang cukup tinggi, sehingga keberadaan ikan diwilayah perairan sejauh 0 sampai dengan 7 mil cukup sulit didapatkan oleh para nelayan, sehingga program pemerintah dalam pembangunan perikanan akan mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan diatas jarak 7 mil sampai pada wilayah laut bebas dan selat sunda pada wilayah perairan Banten.

Sampai saat ini belum adanya kebijakan secara tegas baik pusat maupun daerah yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembalian struktur ekologi wilayah laut Banten terhadap pengelolaan wilayah dari pantai hingga sejauh 7 mil. Diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan kewenangan instansi penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan atas gagasan ini.

Dalam tugas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah TNI AL dan Polair yang ada di Provinsi Banten, sesuai dengan tugas pokok dari masing-masing instansi tersebut dalam pelaksanaan mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui pengamanan dan penindakan terhadap pelanggaran dan tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran dan tindak pidana dilaut. Dengan tetap bertanggungjawab kepada Komando Utama/pimpinan pusat. Sebagaimana TNI AL selain tugas pokoknya menjaga kedaulatan diwilayah laut, sesuai dengan Skep Nomor : Skep/847/IV/1997 mengatur tentang penyelenggaraan desa pesisir, TNI AL dalam implemntasinya melalui Lanal yang ada di Provinsi Banten dengan berperan aktif menempatkan pos-pos pengamat pada setiap daerah pesisir atau pulau sebagai upaya pengawasan dan pengamanan sumberdaya kelautan dan sebagai langkah untuk mendeteksi secara dini tentang situasi dan kondisi wilayah pesisir yang berada diwilayah kerja Lanal Banten dismping TNI Polri sebagai salah satu unsur muspida yang ada di Provinsi Banten,

4.3. Analisa program pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan program pokok yang ditangani Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, terhadap kondisi atau potensi kelautan dan perikanan yang digambarkan dalam beberapa sub sektor meliputi : Perikanan tangkap; Perikanan budidaya; Pengawasan dan Pengendalian sumber daya Kelautan dan Perikanan; Pembinaan usaha bidang kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau pulau kecil yang diharapkan dapat terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat pesisir melalui pengembangan agrobisnis/argoindustri.

Dampak dari kebijakan ini terdapat pada Pembinaan usaha bidang kelautan dan perikanan. Sebagaimana pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang dikeluarkan dari APBD untuk pembinaan usaha bidang kelautan dan perikanan melalui instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu :

- a. Adanya dukungan pemberian bantuan kapal-kapal ikan kepada para nelayan,
- b. Adanya dukungan alat tangkap setiap tahunnya kepada masyarakat nelayan kabupaten/kota.
- c. Adanya bantuan pinjaman modal kepada para nelayan yang membutuhkan dapat melalui Bank, Koperasi dan Unit-unit pelaksana tugas di wilayah Kabupaten/Kota.

Namun mengingat wilayah perikanan di Provinsi banten terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota yang setiap pendapat daerahnya berbeda-beda, secara otomatis kontribusi hasil daerah yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi tidak akan sama dengan hasil yang

diterima dari Kabupaten/kota lainnya. Namun alokasi anggaran pemerintah Propinsi terhadap dukungan untuk Pembinaan usaha bidang kelautan dan perikanan tersebut, alokasi dana APBD yang diberikan kepada setiap Kabupaten/Kota sama besarnya, yang akhirnya terjadi tidak tepat sasaran dalam program pembangunan melalui anggaran APBD Provinsi Banten yang ada. Sebagai contoh wilayah Tangerang yang memiliki PAD cukup tinggi dan diberikan subsidi dengan alokasi anggaran dari APBD yang sama dengan wilayah yang memiliki PAD rendah seperti PAD Kabupaten Lebak. Hal ini akan menghambat perkembangan pembangunan pada suatu daerah tertinggal.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Dari anggaran APBD yang diberikan kepada tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten untuk dukungan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, tidak adanya pengawasan terhadap alokasi anggaran secara optimal, sehingga memberikan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dari dana APBD.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan, propinsi Banten mendasari pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan daerah Propinsi Banten. Namun untuk pemberdayaan masyarakat pesisir di Propinsi Banten sampai sejauh ini belum ada perda yang mengaturnya.

Pasca Otonomi Daerah dalam kegiatan sumberdaya kelautan khususnya pengelolaan sumberdaya laut, di Propinsi Banten mempunyai dampak positif. Sebagaimana sebelum diberlakukan Otonomi daerah. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan banyak dilakukan di wilayah Banten untuk kepentingan diluar wilayah Banten itu sendiri, seperti penyedotan pasir laut yang hasilnya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat diluar wilayah Banten seperti Sumatra, Jawa dan Jakarta. Kemudian disisi lain pada wilayah perairan diwilayah Banten pasca otonomi daerah tingkat kerawanan terhadap

konflik-konflik antar daerah semakin meningkat seperti perbatasan wilayah penangkapan ikan antar kabupaten. Sebagaimana yang terjadi pada wilayah Karangantu dan pulau Panjang.

4.4. Hasil temuan penelitian.

Terhadap pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian langsung dilapangan, ditemukan beberapa hal yang perlu adanya tindak lanjut dan percepatan pemerintah dalam menentukan kebijakan pelaksanaan yaitu antara lain :

a. Adanya kewenangan dalam masalah perijinan kapal penangkap ikan, sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terhadap surat ijin berlayar kapal perikanan dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui syahbandar perikanan pada wilayah pelabuhan perikanan. Namun pada kenyataannya dalam proses pengesahan Surat Ijin Berlayar kapal perikanan, Dinas perhubungan mempunyai kewenangan dalam penerbitan SIB kapal perikanan. Sehingga pada tingkat bawah hal tersebut terlihat adanya konflik kepentingan antar instansi.

b. Adanya ketidak transparansi kebijakan pemerintah terhadap adanya dana dukungan bagi masyarakat pesisir/melayan di saat musim peceklik. Sebagaimana pada masa orde baru masyarakat pesisir merasakan perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat pesisir melalui bantuan pemerintah bagi nelayan seluruh Indonesia di saat musim peceklik baik dalam bentuk uang maupun barang.

Seiring berjalannya reformasi, masyarakat pesisir/nelayan tidak lagi merasakan hal yang pernah dirasakan pada masa orde baru. Dukungan yang ada saat ini berupa bantuan alat tangkap yang dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan

Perikanan itupun dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan bahkan dengan adanya dukungan tersebut sering menimbulkan konflik antar nelayan, seperti bantuan 15 buah alat tangkap berupa jaring sementara dalam suatu wilayah perikanan terdiri dari ratusan nelayan dan bantuan tersebut bersifat temporer, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat nelayan dan pemerintah karena adanya persepsi yang tidak beralasan terhadap masalah bantuan pemerintah ini,



BAB 5

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya klautan, Provinsi Banten mendasari pada Undan-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan daerah Provinsi Banten. Namun untuk pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi Banten sampai sejauh ini belum ada perda yang mengaturnya.

Permasalahan umum yang dijumpai dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi banten adalah kurangnya modal usaha masyarakat nelayan; rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada; kurangnya pemahaman terhadap nilai sumberdaya kelautan; kurangnya peran aktif kelembagaan yang ada di beberapa wilayah pesisir; masalah lain dalam pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir adalah kurangnya pelibatan instansi yang menbidangi teknis pemberdayaan masyarakat, sehingga program-program di wilayah pesisir tidak berjalan secara optimal.

Kebijakan pemerintah Provinsi terhadap dukungan kegiatan pemberdayaan diwilaya pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan dana yang bersumber dari dana APBD, diberikan langsung kepada setiap Kabupaten di Provinsi Banten. Alokasi anggaran pembangunan dalam bidang pemberdayaan tersebut diberikan kepada masing-masing Kabupaten sebesar Rp 25 milyar setiap tahun anggaran.

Zona perairan diwilayah Banten pasca otonomi daerah tingkat kerawanan terhadap konflik-konflik antar daerah semakin meningkat seperti perbatasan wilayah penangkapan ikan antar kabupaten. Sebagaimana yang terjadi pada wilayah Karangantu dan pulau Panjang; konflik yang disebabkan karena adanya jaring yang masuk dalam wilayah perbatasan penangkapan ikan oleh nelayan karangantu.

2. Saran-saran

a. Adanya perhatian pemerintah terhadap alokasi dana yang ditujukan untuk pembangunan daerah Provinsi dengan memberlakukan subsidi silang yang berorientasi pada dukungan dana yang lebih mengutamakan pada wilayah yang memiliki PAD rendah atau dengan kata lain alokasi dana diprioritaskan pada wilayah yang membutuhkan dana pembangunan.

b. Percepatan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan program pemanfaatan sumberdaya perikanan yang dalam kegiatannya dilakukan penangkapan ikan dengan teknologi yang memadai pada wilayah laut diatas 7 mil dari bibir pantai. Serta percepatan kebijakan pemerintah Provinsi dalam melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi wilayah laut sejauh 7 mil dari bibir pantai.

c. Kabupaten dalam memberikan perijinan mengenai alat tangkap kapal-kapal perikanan harus mengacu pada Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Sehingga tidak merugikan para nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut karena penggunaan alat tangkap. Sebagaimana contoh tertangkapnya 3 unit kapal nelayan yang berukuran 10 Gt tertangkap oleh kapal *patroli Polair(Sidak)* dari Mabes Polri hanya karena masalah alat tangkap yang disatu sisi dalam kebijakan pemerintah Kabupaten dinyatakan alat tersebut dibolehkan. Namun dalam aturan perundangan, alat tangkap tersebut dilarang oleh Undang-Undang Perikanan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

Van den Ban dan H.S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Penerbit Kanisius.

Simbolon, *Ancaman Disintegrasi Bangsa* Romulo 1999.

Agus Wirahadikusuma, *Indonesia Baru dan Tantangan TNI, Pemikiran Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ermaya, Suadinata, dan Alex Duth, 2001. *Geopolitika dan Konsepsi Ketahanan Nasional Pemikiran Awal, Pengembangan dan Prospek*, Cipta Yatsigama, Jakarta

Said Zaenal Abidin, *Bureaucracy and public administration in Indonesia*. Jakarta 2006

Robert A Simanjuntak, *Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Prospek, dan Kebijakan*, LPEM UI, 2003

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama 2002.

Moh. Nazir, (2005) *Metode Penelitian, Bogor, Ghalia Indonesia*.

Satjipto Rahardjo, (2006) *Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti*.

Imam Chourman (2006) *Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Al-Haramain Publising House.

Maria Farida Indrati S (2007), *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius.

- Pranarka, (1996) *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Ginanjar Kartasasmita, 1996, *pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta, PT, Pustaka Cidesindo.
- Moleong, Lexy J (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Iqbal Hasan, (2002), *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutrisno, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, Bambang Rudito, 2003,
- Wan Usman dkk, *Daya Tahan Bangsa (Pengkajian ketahanan Nasional Program Pascasarjanaan UI.)*.
- Michael P. Todaro, Stephen C Smith, *Pembangunan ekonomi di dunia ke tiga edisi kedelapan*, penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *BANTEN DALAM ANGKA 2010*.
- Mayer, Robert R, Dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Hornby, AS, 'Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English,' tahun 1987, 1990
- Neufeld, Victoria, *Webster New World Dictionary of American English,* Third College Edition,

Dokumen

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Petani Tambak dalam Dunia Pembangunan Daerah, pada Seminar Nasional di Universitas Tirtayasa dan Badiklat Profinsi Banten, Februari 2011

Teori Hukum dan Pembanguann, Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. *Sebuah Kajian Deskriptif Analitis* Oleh : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

Hasil Kesepakatan Pembahasan Pra-Musrenbangnas Tahun 2011, KonsolidasiPra-Musrenbangnas RKP Tahun 2012, Jakarta, 27April 2011

Pegelolaan Berkelanjutan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. Siaran Pers, 06/08/2010

Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia. *Masalah dan kebijakan peningkatan produk perikanan untuk pemenuhan gizi masyarakat*, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil **Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan**. Kamis, 21 November 2007.

Lembaga Administrasi Negara dan Departemen Dalam Negri, 2007. *Modul 2 Entrepreneurship Dan Pembangunan Wilayah Diklat Teknis Pembangunan Ekonomi Daerah (Regional Economic , Development)*.

Prof. Drs. Indah Suailowati, M,Sc.,Ph.D. *Keselaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan bagi manusia dan lingkungan*, dalam pidato pengukuhan Guru Besar fakultas ekonomi Semarang Maret 2006.

Pemberdayaan masyarakat dalam Konsep Pembangunan yang berakar pada masyarakat, Ginandjar Kartasmita Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.

Undang-Undang :

Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 31 tahun 2004 tentang *Perikanan*.

Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2000 tentang *Otonomi daerah*

Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 1999, tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1999, tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, tentang *Usaha Izin Usaha Perikanan*.

Surat Keputusan Nomor : Skep/847/IV/1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Desa Pesisir di Lingkungan TNI AL.

Media masa :

Adam I. Indarawijaya, *Perubahan Dan Pengembangan Organisasi*, Sinar Baru Bandung, 1989.

A.M.W. Pranarka dan Vidyandika Moeljarto, *Pemberdayaan*, Dalam Onny S.Prijono dan A.M.W.

Akses Peran Serta Masyarakat Lebih jauh Memahami Community Development, Sinar Harapan, Jakarta.

Ermaya, *Hukum Dasar Geopolitik Dan Geostrategi, Dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, Suara Bebas, Jakarta, 2005, hlm 16-28.

Informasi layanan tentang profil Banten sumberdaya lingkungan hidup.

Ayu Pratiwi dan Syafran hadi, *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*,

BPK Diminta Audin PAD Banten, Radar Banten, 03 November 2010

PAD Banten Rp. 1,122 T, Radar Banten, 07 Juli 2010

Infrastruktur di Banten Dinilai Gagal, Radar Banten 31 Desember 2009

Menjembatani Iptek bagi kepentingan Masyarakat, buletin Litbangda Profinsi Banten.

Pemprof Banten Dukung Peningkatan Perikanan, Seputar Banten, 31 Januari 2011

Stop Illegal Fishing untuk kesejahteraan masyarakat, Green Blue Phinisi, 12 Juli 2009

Desentralisasi Salah Arah, Radar Banten 17 Juli 2010

UNCLOS Sangat Perinci Menyikapi Pencemaran Laut, ikanbijak 14 Maret 2008

Daftar wawancara.

Kolonel Laut (P). Agus Supriyatna, Komandan Lanal Banten.

Drs. Asmudji, Kasbangpol, Gubernur Propinsi Banten.

Rikrik Hermawan, Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Badan Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat desa. Propinsi Banten

Ir. H. Suyitno, M.M, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten,

Ir. Wahjul Chair, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten.

Yudi Heriyawan, S.Pi, M..Si, Kasubag Program Evaluasi dan Laporan Propinsi Banten..

Suripto, S.Sos. M.Si. Dirjen Perhubungan, Kadis Perhubungan Laut Kabupaten Labuhan,

Safari, S.Ip Dirjen Perhubungan, Kadis Perhubungan Laut Kabupaten Karangantu.

H. Agus Priyadi M, S.Sos, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Pandegelang.

Budi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang.

Lettu Betu Harnoto, Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Banten.

Yanto Yuniyanto, Staf Upt PPPI/TPI. (Tempat Pelelangan Ikan) Labuhan.

Dedy, Ketua TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Karangantu.

Minsari, Ketua HNSI Kecamatan Kasemen Karangantu.

Amin Napitupulu, Ketua HNSI wilayah Merak.

TB. Muhyidin M.Mr, Wakil Ketua HNSI Propinsi Banten.

Bripka, Deni Matik, Dan Pospolair Panimbang Kabupaten Pandeglang.

Brigadir Kepala Soyib, Komandan Pos Polair Panimbang

Sarijo, Kepala Pengawas Perikanan Kabupaten Karangantu.

H. Nawawi, Ketua Kelompok Pengawasan Masyarakat Nelayan Karangantu,
Kabupaten Serang.





**DAMPAK KEBIJAKAN PERIKANAN
TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN**

PENGANTAR

Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i diminta untuk membantu memberikan informasi/masukan/data terkait dengan “ Dampak Kebijakan Perikanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ” dengan memberikan jawaban pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kuisisioner/angket ini dimaksudkan dan ditujukan untuk kepentingan penelitian tesis. Kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu/ Saudara/i dijamin sesuai dengan standar profesionalisme dan etika penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menetapkan prioritas dari tiga pendekatan yang digunakan untuk Peran Regulasi Perikanan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan. Pendekatan-pendekatan tersebut sebagai berikut :

1 Pendekatan Daya beli.

Pendekatan ini merupakan model pendekatan dimana untuk mengetahui tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat nelayan di wilayah panimbang atas kegiatan menangkap ikan, maka dapat terlihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi segala kebutuhannya dengan cara mereka membeli barang-barang mewah dengan harga yang cukup tinggi.

2. Pendekatan kemandirian produksi.

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mengukur sejauhmana kemampuan masyarakat nelayan dalam menciptakan lapangan kerja diwilayahnya sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan masyarakat nelayan dalam upaya mengoptimalisasikan produktifitas usaha perikanan melalui sumberdaya yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Labuhan Kabupaten Pandeglang dan Karang Antu Kabupaten Kota Serang Propinsi Banten.

3. Pendekatan Penagakan Hukum.

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum atau instansi yang terkait terhadap segala hal yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat nelayan dalam bentuk aturan-aturan yang harus di taati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan sebagai fungsi kontrol terhadap para pengambil keputusan.

Ketiga pendekatan diatas memiliki enam kreteria yang merupakan instrumen yang akan digunakan dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah. Suatu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terhadap ketentuan yang belum diatur didalam Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berada diatasnya. Dalam hal ini kewenangan Dirjen Perikanan dan kelautan dalam pembangunan perikanan indonesia melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan arah dari kebijakan pusat dalam rangka pencapaian tujuan dari pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia.
2. Pembinaan Organisasi. Pemerintah Daerah, dalam implementasi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam kaitanya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan daerah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menjalankan ketentuan tersebut dan dalam pelaksanaanya pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pusat yang sudah ada.
3. Geografi. Kondisi alam diwilayah Propinsi Banten yang bisa berupa cekungan pantai, keadaan bagian dasar laut, pulau-pulau disekitarnya, keberadaan biota laut dan cuaca. Kondisi geografi pada masing-masing wilayah pesisir berbeda-beda diberbagai wilayah pesisir propinsi Banten. Geografi dipilih sebagai kreteria karena faktor ini bisa menjadi penentu kebijakan apa yang akan diambil setelah mengetahui kondisi geografi diwilayah pesisir.
4. Budaya. Masyarakat nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir dengan kegiatan usahanya sehari-hari adalah menangkap ikan. Pada kelompok tersebut merupakan kelompok masyarakat yang sangat berperan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan indonesia. Sebagaimana dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir di wilayah Labuhan Kabupaten Pandegelang, yang selama ini banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Propinsi Banten dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keadaan infrastruktur berupa jalan rusak sepanjang perjalanan dari carita sampai Labuhan.

5. Ekonomi. Dibandingkan dengan wilayah daratan wilayah laut sudah semestinya banyak memberikan kontribusi yang cukup tinggi kepada pemerintah. Permasalahan yang sangat menonjol di wilayah pesisir adalah sosial ekonomi yang perlu diatasi dengan segera untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat nelayan yang lebih baik. Sejumlah warga nelayan dalam hal pemukiman masih tergolong kumuh.

Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan mereka yang jauh dari pendapatan masyarakat pada umumnya. Disatu sisi adanya pungutan retribusi, disisi lain kurangnya kepedulian pemerintah dalam memperhatikan sarana dan prasarana masyarakat yang tinggal di daerah pesisir laut dan kegiatan operasional para nelayan dalam penangkapan ikan.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Organisasi masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang terstruktur secara nasional dan mempunyai visi dan misi yaitu dengan misi memperjuangkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia dan mempunyai misi memperkokoh organisasi dengan melaksanakan program kerja yang terarah dan terkendali. Dalam organisasi ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan perikanan Indonesia, namun pada kenyataannya Kebijakan pemerintah.



UNIVERSITAS INDONESIA

Data Responden

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Petunjuk Pengisian

1. Setiap pertanyaan terdiri dari dua model yaitu Model a dan Model b, silahkan anda memilih salah satu model yang menurut anda paling mudah untuk menjawabnya.
2. Berilah garis bawah pada pilihan jawaban yang anda anggap paling benar.

Contoh pengisian jawaban dari pertanyaan kuesioner, sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah panimbang, seberapa pentingkah :

- a. Peranan **KEBIJAKAN PEMERINTAH** jika dibandingkan dengan **PEMBINAAN ORGANISASI**.

Jawab : (sama/sedikit lebih/lebih/sangat lebih/paling) penting

- b. Peranan **PEMBINAAN ORGANISASI** jika dibandingkan dengan **KEBIJAKAN PEMERINTAH**.

Jawab : (sama/sedikit lebih/lebih/sangat lebih/paling) penting

Artinya anda telah memilih menjawab pertanyaan model a, maka model b tidak perlu dijawab..Jadi menurut anda peranan Kebijakan pemerintah sangat lebih penting dibandingkan dengan pembinaan organisasi.

Demikian sebaliknya, jika anda memilih menjawab b maka model a tidak perlu dijawab.

Banten,

PERTANYAAN KUISIONER PENELITIAN

Jawablah (a) atau (b) dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan.

Ditinjau dari pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan, seberapa pentingkah :

1.a. Peranan kebijakan pemerintah jika dibandingkan dengan pembinaan organisasi ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan Peranan kebijakan Pemerintah ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

2.a. Peranan kebijakan pemerintah jika dibandingkan dengan Geografi?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan Geografi jika dibandingkan dengan kebijakan pemerintah ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

3.a. Peranan kebijakan pemerintah jika dibandingkan dengan ekonomi masyarakat?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan peranan kebijakan Pemerintah ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

4.a. Peranan kebijakan pemerintah jika dibandingkan dengan Budaya. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan Budaya jika dibandingkan dengan peranan kebijakan pemerintah. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

5.a. Peranan kebijakan pemerintah jika dibandingkan dengan peranan LSM ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM jika dibandingkan dengan peranan kebijakan pemerintah ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

6.a. Peranan Pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan peranan geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan Geografi jika dibandingkan dengan peranan Pembinaan organisasi. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

7.a. Peranan Pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan Ekonomi masyarakat. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan Ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan Pembinaan organisasi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

8.a. Peranan Pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan peranan Budaya.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan Budaya jika dibandingkan dengan peranan Ppembinaan organisasi. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

9.a. Peranan Pembinaan organisaasi jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM jika dibandingkan dengan peranan Pembinaan organisasi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

10.a. Peranan Geografi jika dibandingkan dengan Ekonomi masyarakat. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan Ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan peranan Geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

11.a. Peranan Geografi jika dibandingkan dengan peranan Budaya. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan Budaya jika dibandingkan dengan peranan Geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

12.a. Peranan Geografi jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM jika dibandingkan dengan peranan Geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

13.a. Peranan Ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan Budaya ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan Budaya jika dibandingkan dengan peranan Ekonomi masyarakat. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

14.a. Peranan Ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM Jika dibandingkan dengan peranan Ekonomi masyarakat. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

15.a. Peranan Budaya jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM jika dibandingkan dengan peranan Budaya. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan dalam kebijakan pemerintah, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, seberapa pentingkah :

16.a. pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

17.a. Pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Pembinaan hukum.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

18.a. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Pembinaan hukum.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan dalam pembinaan organisasi, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, seberapa pentingkah :

19. a. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

20.a. Pendekatan Kemandirian produksi dengan Pendekatan Pembinaan hokum. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Kemandirian produksi. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

21.a. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Pembinaan hukum.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan dalam aspek Geografi, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, seberapa pentingkah :

22. a. pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

23.a. Pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Pembinaan hukum.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

24.a. pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Pembinaan hukum.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan dalam bidang Ekonomi, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, seberapa pentingkah :

25. a. pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

26.a. Pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Pembinaan hukum. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Kemandirian produksi. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

27.a. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Pembinaan hukum.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan dalam aspek Budaya masyarakat, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, seberapa pentingkah :

28 a. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

29.a. Pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Pembinaan hukum. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

30.a. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Pembinaan hukum.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan LSM, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, seberapa pentingkah :

31a. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

32.a. Pendekatan Kemandirian produksi dengan pendekatan Pembinaan hukum. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan Kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

33.a. Pendekatan Pembinaan hukum dengan pendekatan daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan Daya beli masyarakat dengan pendekatan Pembinaan hukum.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA HNSI
DI WILAYAH SERANG.**

1. Apakah peranan HNSI di wilayah banten...?
2. Apakah HNSI yang ada saat ini mampu mendukung segala kebutuhan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan..?
3. Apa alasannya jika belum atau sudah mampu dalam mendukung segala kebutuhan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan..?
4. Bagaimana dengan program HNSI wilayah serang/pandeglang dalam kaitanya dalam upaya meningkatkan usaha penangkapan ikan atau perikanan ?
5. Menurut pendapat saudara apakah masyarakat nelayan yang ada di wilayah panimbang ini sudah mampu mengembangkan usaha perikanannya secara optimal.? jelaskan..!
6. Apakah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat nelayan....? Apa alasannya.
7. Apakah menurut sdr masyarakat nelayan kabupaten serang/Pandeglang dapat melaksanakan ketentuan pemerintah daerah dengan baik.?
8. Bagaimanakah penyelesaian yang terjadi antara masyarakat nelayan dengan instansi pemerintah setempat jika terjadi permasalahan yang ada hubunganya dengan pelaksanaan kegiatan nelayan.?

PEDOMAN WAWANCARA
BIDANG PEMBERDAYAAN PROPINSI BANTEN

1. Apakah visi dan misi dari pemerintah kabupaten kaitanya dengan pembangunan perikanan indonesia ?
2. Apakah program-program yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut ?
3. Strategi Apa yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten untuk mencapai sasaran sesuai dengan misi dan visi ?
4. Faktor apa yang mempengaruhi pembangunan perikanan diwilayah kabupaten ?
5. Bagaimana peran pemerintah propinsi dalam mendukung pemerintah kabupaten untuk memberdayakan masyarakat pesisir/nelayan dalam upaya meningkatkan ketahanan wilayah?
6. Bagaimana peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.?
7. Bagaimana Konsep pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Wilayah Pesisir Banten.
8. Bagaimana peranan dampak Kebijakan perikanan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan diwilayah Kabupaten.?

PEDOMAN WAWANCARA**KETUA (TPI) TEMPAT PELELANGAN IKAN DIWILAYAH KABUPATEN**

1. Sejauh yang saudara ketahui, apakah ada standarisasi sarana dan prasarana pelelangan ikan disetiap TPI ?
2. Apakah TPI disini sudah memenuhi standar operasional pelelangan ikan sesuai ketentuan. ?
3. Apakah seluruh kapal ikan diwilayah ini hasil tangkapnya selalu dilakukan pelelangan di TPI..?
4. Apakah yang menjadi hambatan petugas TPI supaya para nelayan bersedia melakukan pelelangan ikan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.?
5. Apakah tindakan petugas TPI setempat apabila nelayan tidak melakukan penjualan ikan melalui tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh pemerintah yaitu TPI..?
6. Menurut saudara upaya apa yang telah dilakukan oleh TPI wilayah kabupaten dalam memaksimalkan keinginan masyarakat nelayan untuk melakukan pelelangan ikan di TPI..?

PEDOMAN WAWANCARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BANTEN.

1. Apakah kebijakan perikanan pusat yang ada saat ini dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah kabupaten..?
2. Dengan adanya perubahan undang –undang perikanan nomor 31 tahun 2004 apakah pelanggaran terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dapat diminimalisir..?
3. Bagaimana Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memperdayakan masyarakat nelayan guna meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumberdaya perikanan ?
4. Menurut Pandangan bapak apa kelemahan, keunggulan, peluang dan ancaman bagi kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan ?
5. Strategi apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya mengembangkan perikanan indonesia untuk meningkatkan ketahanan masyarakat nelayan. ?
6. Sebagaimana dalam ketentuan perda prof Banten nomor 6/2004 tentang izin usaha perikanan dalam BAB IX pasal 14 pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan secara tehnis operasional dilakssanakan oleh Kadis. ***Bagaimanan pelaksanaanya.?***
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengaruh regulasi perikanan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan..?
8. Menurut bapak yang yang dimaksud dengan Paradigma Pembangunan perikanan Berkelanjutan

PEDOMAN WAWANCARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

1. Apakah upaya pemerintah kabupaten dalam mendukung program pemerintah pusat guna mewujudkan pembangunan perikanan indonesia..?
2. Program apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung program pemerintah pusat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan ?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah provinsi terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.?
4. Bagaimana pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir/nelayan.?
5. Kebijakan apa yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat nelayan kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan.. ?
6. Faktor apa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya perikanan ?
7. Faktor apa yang menghambat perkembangan ekonomi masyarakat pesisir/nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada tingkat kabupaten?
8. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh DKP provinsi terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan Banten.?
9. Bagiamakah dampak kebijakan perikanan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan Banten.?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN
POLAIR BANTEN**

1. Peranan Pol air dalam pemberdayaan masyarakat nelayan..?
2. Kendala apasaja yang sering dihadapi dalam pelaksanaan menciptakan keamanan dalam kegiatan melaut para nelayan ?
3. Bagaimana peran serta Dirpolair polda Banten dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan indonesai khususnya diwilayah Banten ini..?
4. Apakah ada program kerja khusus untuk Dirpolair dalam mengembangkan tingkat keamanan laut diwilayah Banten. ?
5. Program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Dirpolair dalam mendukung pemerintah daerah dalam uapay memberdayakan masyarakat nelayan..?
6. Apa yang menjadikan hambatan terhadap pelaksanaan tugas dilapangan dalam rangka menciptakan keamanan operasi melaut para nelayan.?
7. Selain Dirpolair bertugas untuk mengamnkan wilayah perairan pada tingkat propinsi maupun kabupaten, juga mengawasi kegiatan operasi para nelayan dalam menangkap ikan, apakah ada tugas-tugas kusus yang harus dilaksanakan selain kegiatan pengamanan.?
8. Bagiamakah pendapat bapak dengan adanya peranan regulasi perikanan terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan Banten.?

**PEDOMAN WAWANCARA PERWIRA STAF POTENSI MARITIM
PANGKALAN TNI AL BANTEN.**

1. Bagaimana peranan TNI AL dalam melaksanakan pembinaan daerah pesisir diwilayah kerja pangkalan TNI AL Banten?
2. Bagaimanakah peran serta TNI AL dalam pelaksanaan pembangunan perikanan indonesia melalui pemberdayaan masyarakat pesisir/nelayan ?
3. Dengan adanya perubahan dalam ketentuan Undang-undang Perikanan nomor 31 tahun 2004 apakah ada pengaruhnya terhadap kegiatan operasi TNI AL ?
4. Bagaimana instansi TNI AL melakukan kegiatan keamanan wilayah laut khususnya diwilayah banten. ?
5. Dalam institusi TNI AL apakah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembinaan desa pesisir..?
6. Menurut Pandangan bapak apa kelemahan, keunggulan, peluang dan ancaman bagi pembinaan desa pesisir ?
7. Strategi apa yang akan dilaksanakan oleh TNI AL dalam mengembangkan wilayah pesisir..melalui pemberdayaan masyarakatr nelayan..?
8. Bagaimana respon bapak dengan adanya peranan regulasi perikanan terhadap implemntasi pemberdayaan masyarakat nelayan.?

PERTANYAAN KUISIONER PENELITIAN

Jawablah (a) atau (b) dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan.

Ditinjau dari pihak yang berkepentingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan, seberapa pentingkah :

1.a. Peranan Kebijakan jika dibandingkan dengan peranan pembinaan organisasi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan Peranan Kebijakan.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

2.a. Peranan Kebijakan jika dibandingkan dengan geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan geografi jika dibandingkan dengan peranan kebijakan.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

3.a. Peranan Kebijakan jika dibandingkan dengan peranan ekonomi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan ekonomi jika dibandingkan dengan peranan kebijakan.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

4.a. Peranan Kebijakan jika dibandingkan dengan peranan budaya.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan budaya jika dibandingkan dengan peranan Kebijakan.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

5.a. Peranan Kebijakan jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM jika dibandingkan dengan peranan Kebijakan.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

6.a. Peranan Pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan geografi jika dibandingkan dengan peranan Pembinaan organisasi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

7.a. Peranan Pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan peranan ekonomi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan ekonomi jika dibandingkan dengan peranan Pembinaan organisasi?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

8.a. Peranan Pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan peranan budaya.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan budaya jika dibandingkan dengan peranan Pembinaan organisasi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

9.a. Peranan Pembinaan organisasi jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM jika dibandingkan dengan peranan Pembinaan organisasi?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

10.a. Peranan geografi jika dibandingkan dengan peranan ekonomi masyarakat nelayan?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan ekonomi masyarakat nelayan jika dibandingkan dengan peranan geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

11.a. Peranan geografi jika dibandingkan dengan peranan budaya.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan budaya jika dibandingkan dengan peranan geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

12.a. Peranan geografi jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM jika dibandingkan dengan peranan geografi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

13.a. Peranan ekonomi masyarakat nelayan jika dibandingkan dengan peranan budaya.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan budaya jika dibandingkan dengan peranan ekonomi nelayan ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

14.a. Peranan ekonomi masyarakat nelayan jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM jika dibandingkan dengan peranan ekonomi masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

15.a. Peranan Budaya Jika dibandingkan dengan peranan LSM.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Peranan LSM Jika dibandingkan dengan budaya.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan Pemerintah pusat, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, antara :

16.a. pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

17.a. Pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan penegakan hukum.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

18.a. pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan pemerintah daerah, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, antara :

19. a. pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

20.a. Pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan penegakan hukum.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

21.a. pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan DPR Daerah, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, antara :

22. a. pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

23.a. Pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan penegakan hukum.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

24.a. pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan masyarakat nelayan, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, antara :

25. a. pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

26.a. Pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan penegakan hukum.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

27.a. pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan Himpunan Masyarakat Nelayan, manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, antara :

28 a. pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

29.a. Pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan penegakan hukum.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

30.a. pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

Ditinjau dari pihak berkepentingan Koperasi Unit Desa (KUD), manakah yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat nelayan, antara :

31a. pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan kemandirian produksi.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan daya beli masyarakat.?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

32.a. Pendekatan kemandirian produksi dengan pendekatan penegakan hukum.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan kemandirian produksi.. ?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

33.a. pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan daya beli masyarakat..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting

b. Pendekatan daya beli masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum..?

1	3	5	7	9
sama penting	sedikit lebih penting	lebih penting	sangat lebih penting	paling penting